

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Arah dan tujuan pembangunan daerah pada kurun waktu 5 (lima) tahun antara perodesasi pertama dan kedua (2014 – 2018) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 adalah penataan dan pembangunan daerah di segala bidang, yang ditujukan untuk menciptakan daerah yang maju, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, peningkatan pendidikan dan kesehatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut perlu didukung oleh semua SKPD yang ada di Kabupaten Temanggung. Dinas Pekerjaan Umum adalah satu dari sekian SKPD di Kabupaten Temanggung yang akan dan harus bisa menjadi penyangga utama dari arah kebijakan tersebut utamanya penyediaan infrastruktur.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung periode Tahun 2014 – 2018 disusun untuk menjadikan arah pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan semakin terpadu dan terarah.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang No. 8 Tahun

- 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 No. 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4548)
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 132, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4444).
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025.
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3469).
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4746).
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4624)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 No. 46 Seri e No.7)
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 - 2028.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 -2031 Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1).

24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 23)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung dibuat setiap 5 (lima) tahun kedepan sebagai acuan atau pedoman dari arah dan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung tersebut akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja setiap tahunnya. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum yang dijabarkan sebagai suatu dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung untuk periode 1 (satu) tahun yang akan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra 2014 – 2018 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung merupakan penjabaran rencana detail dari RPJMD Kabupaten Temanggung 2014 – 2018.

1.4 HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum 2014 – 2018 Kabupaten Temanggung sebagai rencana pembangunan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahunan yang dibagi menjadi 5 (lima) Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung sebagai rencana pembangunan daerah pada SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum ini tidak lepas dari RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2014 – 2018 dan RTRW Kabupaten Temanggung, dan juga berpedoman kepada

dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung pada masing – masing bidang. Dalam penyusunannya tanpa meninggalkan acuan dasar RPJMD di atas, serta tidak bertentangan dengan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.

Beberapa perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung yang telah disusun dan ada kaitannya dengan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum 2014 -2018 adalah sebagai berikut :

1. Master Plan Manajemen Persampahan Kabupaten Temanggung;
2. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Temanggung;
3. RPIJM Cipta Karya.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014 – 2018 disusun dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Bab ini menjelaskan tugas, fungsi, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung, sumber daya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung, kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung.

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung, telaahan visi, misi dan program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, telaahan Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu – isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat dan menjabarkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung serta strategi dan kebijakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Bab ini menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja program pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan beserta kebutuhan pendanaannya.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 15 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung adalah merupakan salah satu dinas Teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang penataan ruang, bidang tata kota, serta bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Adapun Fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, tata kota, dan energi dan sumber daya mineral;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, tata kota, dan energi dan sumber daya mineral;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, tata kota, dan energi dan sumber daya mineral;
- d. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, tata kota, serta energi dan sumber daya mineral;
- e. Pengelolaan perijinan pembangunan dibidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, tata kota, energi dan sumber daya mineral;

- f. Penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, tata kota, dan energi dan sumber daya mineral;
- g. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dibidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, tata kota, dan energi dan sumber daya mineral;
- h. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
- i. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi dan Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung terdiri dari :

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang penataan ruang, bidang tata kota, serta bidang energi dan sumber daya mineral, berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, tata kota, dan energi dan sumber daya mineral;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, tata kota, dan energi dan sumber daya mineral;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, tata kota, serta energi dan sumber daya mineral;
- 4) Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, tata kota, serta energi dan sumber daya mineral;
- 5) Pengelolaan perijinan pembangunan di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, tata kota, energi dan sumber daya mineral;

- 6) Penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, tata kota, dan energi dan sumber daya mineral;
- 7) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, tata kota, dan energi dan sumber daya mineral;
- 8) Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
- 9) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi koordinasi perencanaan, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pengoordinasian penyusunan, pengolahan, dan pelayanan data.
- 2) Pengoordinasian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan UPTD
- 4) Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan bidang kesekretariatan
- 5) Pengelolaan urusan keuangan
- 6) Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

a) Kepala Subbagian Perencanaan

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat yang meliputi perencanaan, penyusunan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b) Kepala Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam penyusunan rencana anggaran dan belanja dinas, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggung jawaban keuangan Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tatalaksana, serta kepegawaian dinas.

C. KEPALA BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengaturan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan dan pembinaan teknis di bidang pembangunan, operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- 2) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
- 3) Pemberiaan perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan serta aktifitasnya
- 4) Penyusunan data - data inventarisasi jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapya
- 5) Pelaksanaan tugas - tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas

a) Kepala Seksi Jalan

Kepala Seksi Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang perencanaan, pembangunan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan dan pembangunan jalan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan perencanaan teknis di bidang pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jalan

- 2) Melakukan penyusunan analisa biaya pekerjaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan jalan
- 3) Mengumpulkan dan memutakhirkan data jalan
- 4) Mengembangkan prasarana jalan
- 5) Melaksanakan pengaturan jalan kabupaten yang berupa penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan dan penetapan status jalan
- 6) Membina, mengawasi, mengendalikan serta melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan jalan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan.

b) Kepala Seksi Jembatan

Kepala Seksi Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perencanaan, pembangunan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan dan pembangunan jembatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan perencanaan teknis di bidang Pembangunan, operasi dan Pemeliharaan jembatan;
- 2) Melakukan penyusunan analisa biaya pekerjaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan jembatan;
- 3) Mengumpulkan dan memutakhirkan data jembatan;
- 4) Mengembangkan prasarana jembatan;
- 5) Membina, mengawasi, mengendalikan serta melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan jembatan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan.

c) Kepala Seksi Operasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kepala seksi operasi, pemeliharaan jalan dan jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap;
- 2) Memberi perijinan pemanfaatan prasarana jalan dan jembatan serta pengelolaan pohon ayoman;
- 3) Melaksanakan penanggulangan bencana alam dibidang prasarana jalan dan jembatan; dan
- 4) Pembinaan dan pemanfaatan alat-alat berat dan laboratorium.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan.

D. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN JASA KONSTRUKSI

Kepala Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengaturan, pembinaan, pembangunan/ pengelolaan sumber daya air, energi dan sumber daya mineral dan jasa konstruksi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, kebijakan dan pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Jasa Konstruksi;
- 2) Perencanaan teknis dan pembinaan, peningkatan dan pengembangan serta operasional pemeliharaan dan pengawasan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Jasa Konstruksi;
- 3) Pengelolaan perijinan dan pengamanan peran air permukaan dan atau sumber air;
- 4) Penyusunan inventarisasi data dan informasi di bidang Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Jasa Konstruksi;
- 5) Pembinaan, pengawasan, dan pemberian izin usaha pemanfaatan sumber daya air dan pertambangan mineral;
- 6) Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral;
- 7) Penyelusuran inventarisasi dan pengelolaan kawasan lingkungan geologi di daerah;
- 8) Perencanaan dan pembinaan di bidang teknik dan jasa konstruksi;

- 9) Pembinaan, pengawasan dan pemberian perizinan jasa konstruksi;
dan
- 10) Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a) Kepala Seksi Irigasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral

Kepala Seksi Irigasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pembangunan dan pemeliharaan irigasi dan sumber daya air yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyusunan perencanaan teknis kegiatan pembangunan dan pemeliharaan irigasi dan sumber daya air
- 2) Merencanakan pengelolaan Sumber Daya Air;
- 3) Mengelola kawasan lindung sumber daya air;
- 4) Membentuk wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Kabupaten;
- 5) Menetapkan dan memberikan ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air;
- 6) Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- 7) Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
- 8) Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air;
- 9) Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan perijinan pemanfaatan Air tanah dan tanah pengairan;
- 10) Menyusun dan memantau pelaksanaan pekerjaan eksploitasi Sumber Daya Air;
- 11) Menyelenggarakan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- 12) Mengendalikan daya rusak air yang berdampak skala kabupaten;
- 13) Menyusun rencana kegiatan dan pengembangan irigasi ;
- 14) Menyusun data dan informasi energi dan sumber daya mineral;
- 15) Memberikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pemanfaatan energi dan pertambangan mineral;
- 16) Memberikan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi

lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral;

- 17) Membina dan mengawasi perusahaan kawasan pertambangan;
- 18) Menetapkan wilayah konservasi air tanah;
- 19) Menetapkan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah;
- 20) Menetapkan potensi energi dan cadangan mineral; dan
- 21) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dan Jasa Konstruksi, dan Jasa Konstruksi.

b) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersih

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengembangan sarana dan prasarana air bersih yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyusunan perencanaan teknis pengembangan sarana dan prasarana air bersih dan pengembangan air minum;
- 2) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam hal pembangunan dan pemanfaatan air bersih dan air minum;
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dan Jasa Konstruksi, dan Jasa Konstruksi.

c) Kepala Seksi Jasa Konstruksi

Kepala Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengembangan jasa konstruksi dan sumber daya manusia yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan kemampuan teknologi pelaksanaan konstruksi serta pembinaan terhadap jasa konstruksi;
- 3) Melakukan koordinasi yang berkaitan terhadap pemanfaatan penyedia jasa konstruksi; dan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dan Jasa Konstruksi.

E. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang keciptakaryaan dan pemanfaatan serta pengendalian tata ruang yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan perintisan pembangunan, pembinaan teknis atas pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan kota/desa;
- 2) Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik Pemda serta pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap bangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung;
- 3) Penyelenggaraan pengaturan pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah perkotaan dan pedesaan;
- 4) Pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan pendirian bangunan dan ijin pemasangan reklame; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a) Kepala Seksi Bangunan Gedung

Kepala Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemerintah Daerah yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Merencanakan, melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungan milik Pemerintah Daerah;
- 2) Melaksanakan pendataan bangunan/gedung milik Pemerintah Daerah;
- 3) Melaksanakan pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan dan gedung;
- 4) Memberikan rekomendasi teknis perizinan pendirian bangunan; dan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang.

b) Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengembangan dan pembinaan tata ruang wilayah yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Menghimpun, mengolah dan mendokumentasikan data serta informasi tentang perkembangan tata ruang wilayah perkotaan dan pedesaan;
- 2) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai program dan perkembangan penataan ruang perkotaan dan pedesaan;
- 3) Melakukan koordinasi yang berkaitan dengan pemetaan, pengukuran dan pengaturan ketentuan-ketentuan teknis dalam rangka pemetaan ruang;
- 4) Melakukan koordinasi yang berkaitan dengan perizinan dalam rangka pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- 5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah perkotaan dan pedesaan;
- 6) Melaksanakan administrasi perijinan pemasangan reklame; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang.

c) Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman

Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perencanaan program kabupaten dibidang perumahan/ permukiman dan pengembangan kawasan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan kawasan pedesaan dan perkotaan;
- 2) Merencanakan dan melaksanakan program penunjang pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;
- 3) Melaksanakan perencanaan, pengaturan, inisiatif program, partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan pedesaan;

- 4) Merencanakan dan melaksanakan OP Drainase;
- 5) Melaksanakan evaluasi terhadap pembangunan sarana dan prasarana serta penanganan pembangunan kawasan pedesaan/perkotaan;
- 6) Merencanakan pembangunan rusunawa dan rusunami dan pembangunan rumah untuk korban bencana;
- 7) Melaksanakan pembinaan tentang peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
- 8) Menyusun rencana induk drainase;
- 9) Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan drainase;
- 10) Mengevaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah Kabupaten;
- 11) Menyelesaikan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang.

F. KEPALA BIDANG TATA KOTA

Kepala Bidang Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang kebersihan, pengelolaan persampahan, pertamanan, dan penerangan jalan umum yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat dan instansi lain di bidang kebersihan, pengelolaan persampahan, pertamanan, dan penerangan jalan umum;
- 2) Pengelolaan perlengkapan peralatan dan perbekalannya;
- 3) Penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang kebersihan, pengelolaan persampahan, pertamanan, dan penerangan jalan umum;
- 4) Pelaksanaan kegiatan kebersihan, pengelolaan persampahan, pertamanan, dan penerangan jalan umum;

- 5) Pengelola peralatan dan perlengkapan operasional kebersihan, pengelolaan persampahan, pertamanan, dan penerangan jalan umum; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a) Kepala Seksi Kebersihan

Kepala Seksi Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang penyusunan data mengawasi kebersihan jalan, lingkungan, drainase perkotaan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Mengawasi dan melaksanakan penyapuan jalan dan lingkungan;
- 2) Mengelola dan memelihara peralatan kebersihan dan perlengkapan kerja; dan
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota

b) Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan

Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan persampahan dan peralatan kebersihan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Mengawasi pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA);
- 2) Mengelola dan memelihara peralatan kebersihan dan perlengkapan kerja;
- 3) Mengoperasionalkan dan memelihara armada sampah; dan
- 4) Melaksanakan pemerataan, pengerukan dan pembuatan pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA);
- 5) Mengolah sampah dan limbah cair; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota.

c) Kepala Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum

Kepala Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang

pertamanan dan penerangan jalan umum yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan taman;
- 2) Mengoperasikan dan memelihara peralatan taman; dan
- 3) Melaksanakan pendataan lampu penerangan jalan umum dan meterisasi;
- 4) Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
- 5) Mengoperasikan dan memelihara peralatan penerangan jalan umum;
- 6) Melaksanakan pembinaan penggunaan penerangan jalan umum; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Tata Kota.

G. Kepala UPTD Wilayah Temanggung, Parakan, Kandangan, Ngadirejo, Kranggan dan Tembarak

Kepala UPTD DPU mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagai pelaksana operasional Dinas di wilayah kerjanya yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

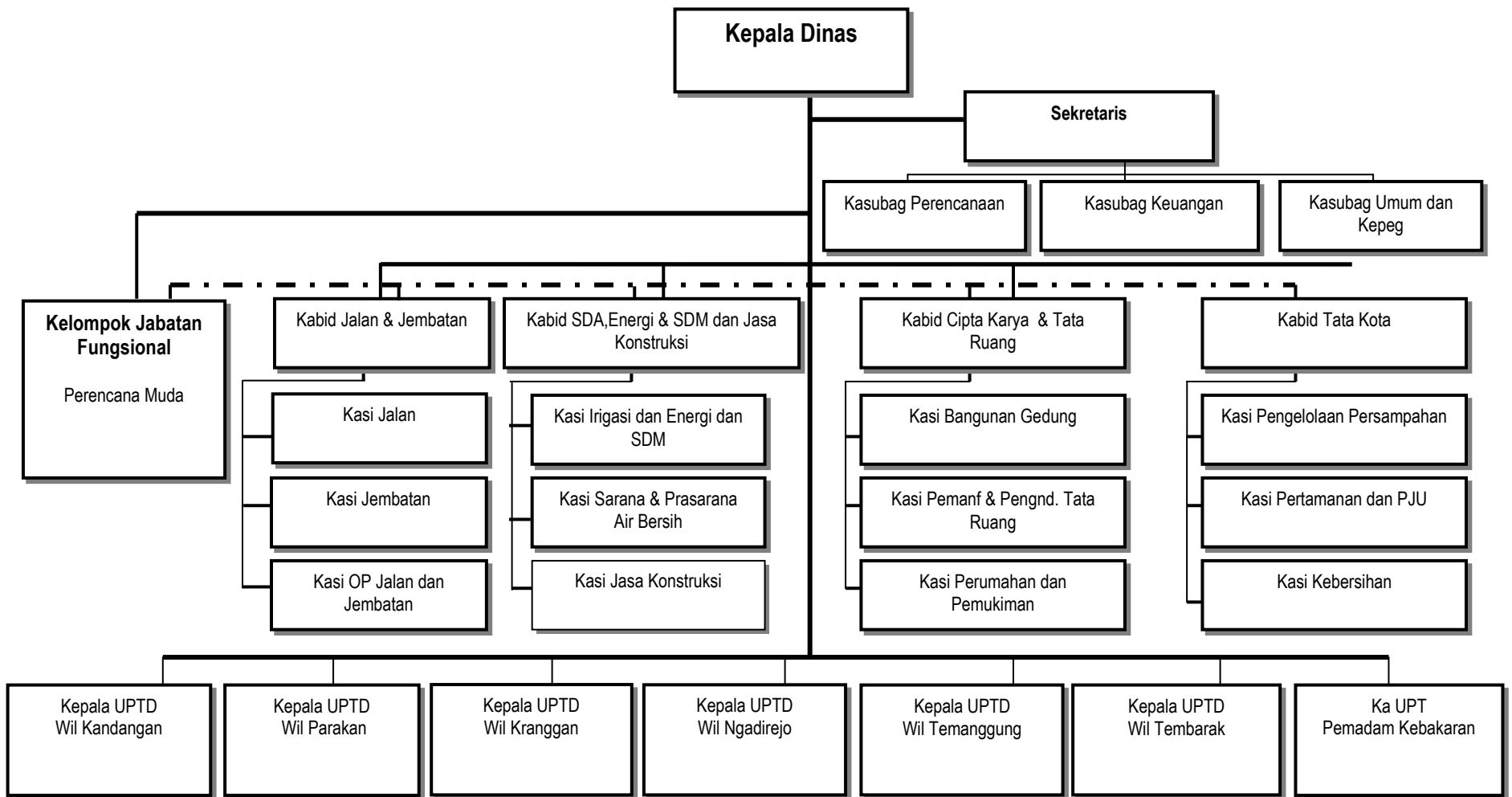
- 1) Penyusunan rencana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum di wilayah kerjanya;
- 2) Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pekerjaan umum di wilayah kerjanya;
- 3) Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya;
- 5) Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas Pekerjaan Umum di wilayah kerjanya;
- 6) Penyelenggaraan Tata Usaha UPTD Pekerjaan Umum di wilayah kerjanya; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Susunan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung dapat dijabarkan dengan bagan struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung sebagai berikut :



Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

2.2 SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung didukung personalia sebanyak 341 pegawai yang terdiri dari berstatus PNS dan non PNS, untuk posisi pada Januari 2014.

Jumlah PNS berdasarkan jenis pendidikannya yaitu : S-2 sebanyak 7 orang, S-1 sebanyak 23 orang, D-III sebanyak 6 orang, SLTA sebanyak 102 orang, SLTP sebanyak 32 orang dan yang berpendidikan SD sebanyak 131 orang.

Jumlah Personil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung dijelaskan dalam tabel dan gambar berikut :

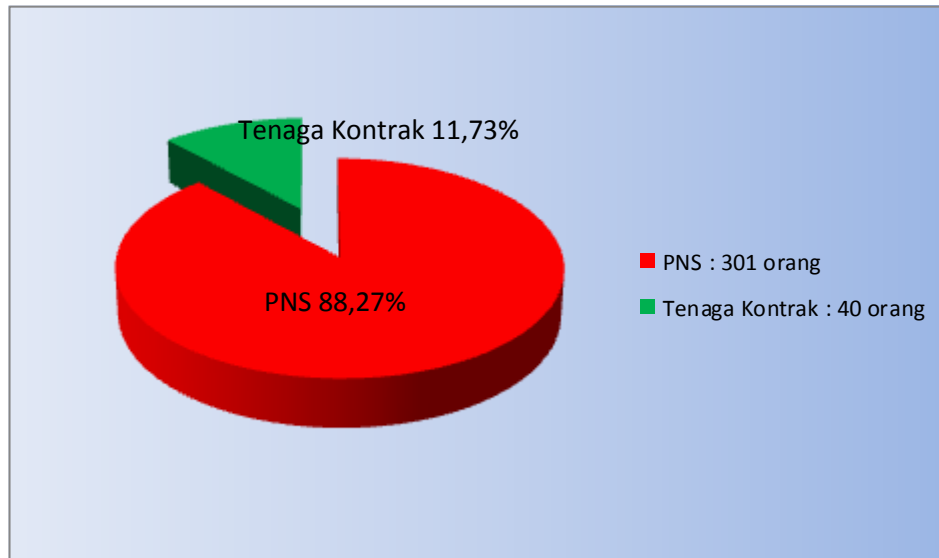
Tabel 1
Jumlah pegawai berdasarkan status

Nomor	Status	Jumlah
1.	PNS	301 orang
2.	Tenaga Kontrak	40 orang
Jumlah		341 orang

Sumber :Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014

Gambar 2

Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Status



Tabel 2

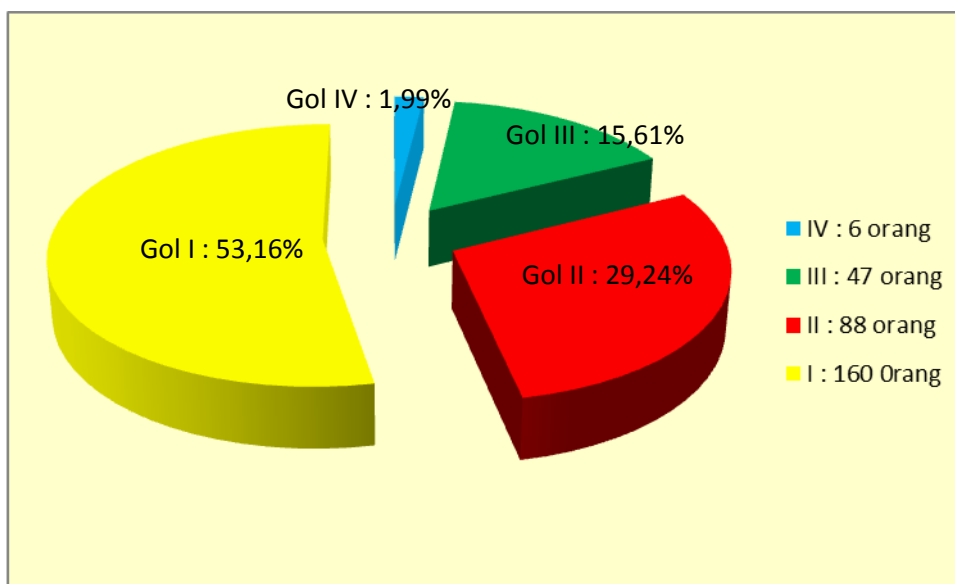
Jumlah Pegawai berdasarkan Kepangkatan

Nomor	Golongan	Jumlah
1.	IV	6 orang
2.	III	47 orang
3.	II	88 orang
4.	I	160 orang

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014

Gambar 3

Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan



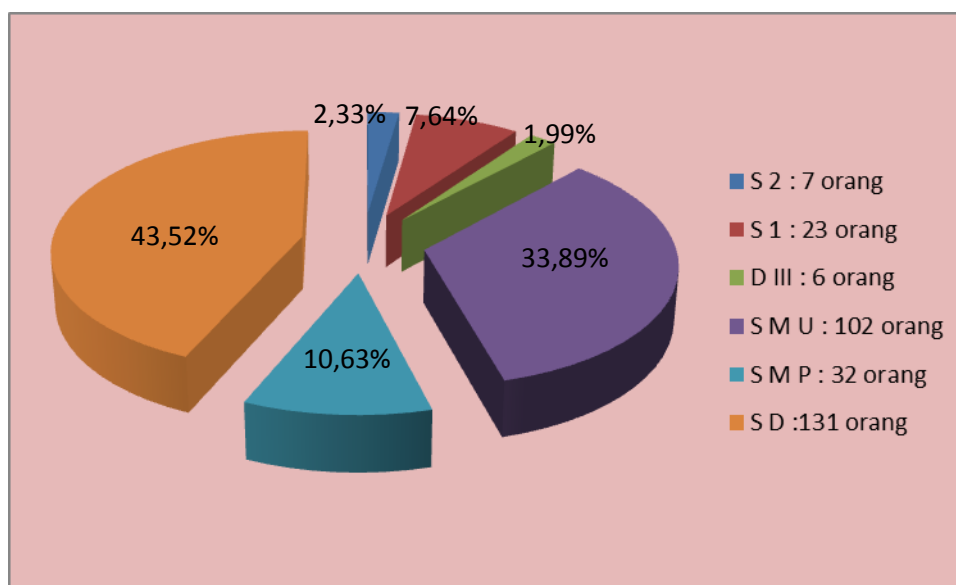
Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

Nomor	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S 2	7 orang
2.	S 1	23 orang
3.	D III	6 orang
4.	S M U	102 orang
5.	S M P	32 orang
6.	S D	131 orang

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014

Gambar 4

Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Tabel 4

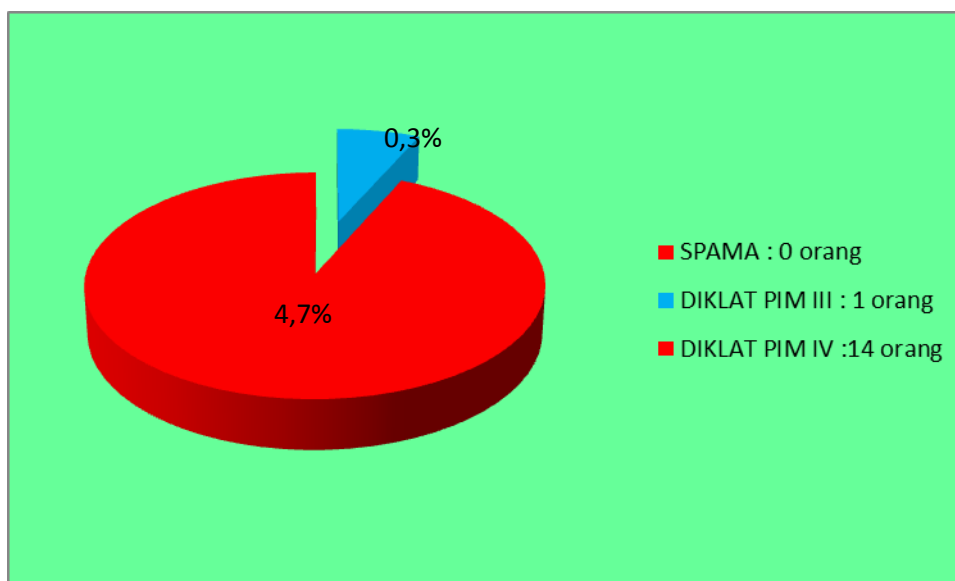
Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Struktural

Nomor	Penjenjangan / Diklat	Jumlah
1.	SPAMA	0 orang
2.	DIKLAT PIM III	1 orang
3.	DIKLAT PIM IV	14 orang
	JUMLAH	15 orang

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014

Gambar 5

Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Struktural



Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut ini :

Tabel 5
Kondisi Sarana dan Prasarana

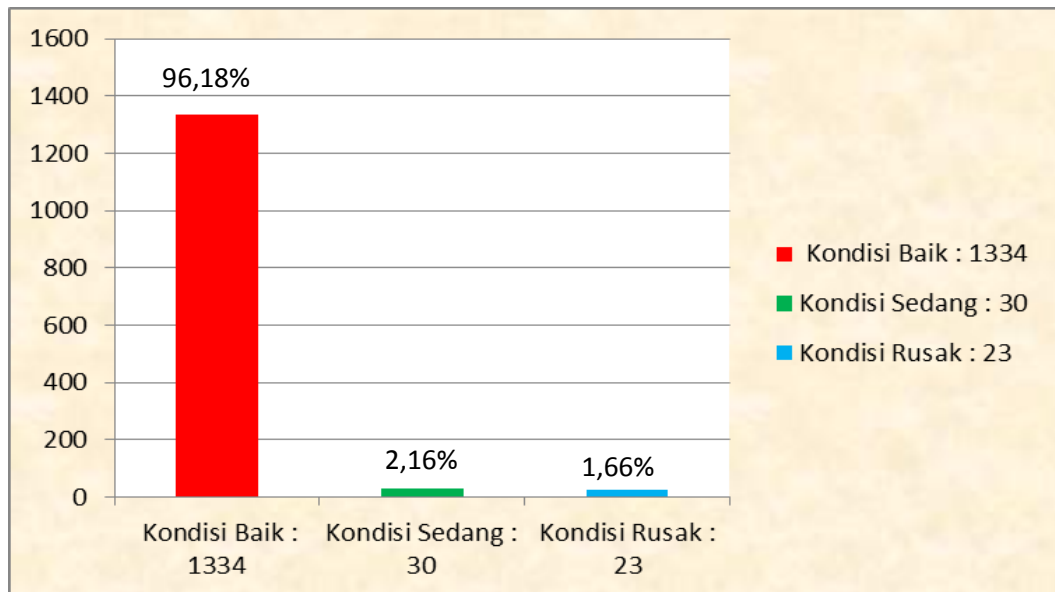
No	Sarana dan Prasarana	Kondisi		
		Baik	Sedang	Rusak
1	Gedung DPU dan 6 Gedung UPT DPU	1	6	-
2	13 Tanah Bangunan	13	-	-
3	410 Tanah Lambiran	410	-	-
4	107 Tanah Lambiran Sungai	107	-	-
5	98 Tanah Lambiran saluran	98	-	-

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi		
		Baik	Sedang	Rusak
6	270 Tanah untuk jalan	270	-	-
7	48 sepeda motor	11	19	8
8	3 pick up kijang KF	-	3	-
9	1 Taft Rocky	-	1	-
10	2 pick up colt 120	1	1	-
11	4 kijang pick up	4	-	-
12	2 jeep	-	-	2
13	1 Isuzu Panther Station Wagon	1	-	-
14	1 Hilux	1	-	-
15	3 Minibus	3	-	-
16	3 mobil pemadam	2	-	1
17	14 Dump truck	8	-	6
18	2 Mobil Tangki	2	-	-
19	13 Mesin gilas	10	-	3
20	2 Buldozer	2	-	1
21	1 Wheel Loader	-	-	1
22	1 Excavator	1	-	-

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi		
		Baik	Sedang	Rusak
23	1 Sky Lift (truck tangga)	1	-	-
24	1 Isuzu Panther pick up	1	-	-
25	19 Sepeda Motor roda 3	18	-	1
Total		1334	30	23

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014

Gambar 6
Proporsi Kondisi Sarana dan Prasarana di Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Temanggung



Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung didukung dengan perlengkapan organisasi. Jumlah perlengkapan organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 6
Jumlah perlengkapan Organisasi

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang / Register (bh)	Lokasi Barang
PERLENGKAPAN UPTD KRANGGAN			
1	Meja tulis	9	UPTD Kranggan
2	Meja tulis kaki besi	1	UPTD Kranggan
3	Kursi Putar	1	UPTD Kranggan
4	Kursi Lipat	2	UPTD Kranggan
5	Kursi Busa	6	UPTD Kranggan
6	Kusi Kayu	7	UPTD Kranggan
7	Feeling Kabinet	2	UPTD Kranggan
8	Almari 2 Pintu	3	UPTD Kranggan
9	Mesin Ketik	1	UPTD Kranggan
Jumlah		32	
PERLENGKAPAN UPTD NGADIREJO			
10	Meja tulis	12	UPTD Ngadirejo
11	Meja kerja	1	UPTD Ngadirejo
12	Meja tamu/kursi	1	UPTD Ngadirejo
13	Kursi Kayu	12	UPTD Ngadirejo
14	Almari Buku	4	UPTD Ngadirejo
15	Mesin Ketik	2	UPTD Ngadirejo
16	Peta Kab. Temanggung	1	UPTD Ngadirejo
17	Peta Wilayah	2	UPTD Ngadirejo
18	Papan Kepegawaian	2	UPTD Ngadirejo
Jumlah		37	
PERLENGKAPAN UPTD TEMBARAK			
23	Meja Kerja	7	UPTD Tembarak

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang / Register (bh)	Lokasi Barang
24	Meja Tulis	1	UPTD Tembarak
25	Meja Tamu/Kursi	1	UPTD Tembarak
26	Kursi Lipat	1	UPTD Tembarak
27	Kursi Kayu	9	UPTD Tembarak
28	Mesin Ketik	1	UPTD Tembarak
Jumlah		20	
PERLENGKAPAN UPTD KANDANGAN			
30	Meja Tulis	5	UPTD Kandangan
31	Meja Tulis Biasa	10	UPTD Kandangan
32	Meja Tamu/Kursi	1	UPTD Kandangan
33	Rak Buku	4	UPTD Kandangan
34	Kursi Putar	1	UPTD Kandangan
35	Kursi Lipat	8	UPTD Kandangan
36	Kursi Busa	5	UPTD Kandangan
37	Feeling Kabinet	2	UPTD Kandangan
38	Almari Kayu	2	UPTD Kandangan
39	Mesin Ketik	4	UPTD Kandangan
40	Telepon	1	UPTD Kandangan
41	Peta Kabupaten	1	UPTD Kandangan
44	Meja Gambar	2	UPTD Kandangan
42	Papan Nama Kegiatan	1	UPTD Kandangan
Jumlah		47	
PERLENGKAPAN UPTD PARAKAN			
44	Meja Tulis	9	UPTD Parakan
45	Meja Tamu/Kursi	1	UPTD Parakan
45	Kursi Busa	7	UPTD Parakan

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang / Register (bh)	Lokasi Barang
47	Kursi kayu	4	UPTD Parakan
48	Almari Kaca	1	UPTD Parakan
49	Almari Kayu	1	UPTD Parakan
50	Mesin Ketik	1	UPTD Parakan
Jumlah		24	
PERLENGKAPAN UPTD TEMANGGUNG			
51	Meja Biro	1	UPTD Temanggung
52	Meja setengah Biro	4	UPTD Temanggung
53	Meja	8	UPTD Temanggung
54	Meja Tamu/Kursi	1	UPTD Temanggung
55	Meja Komputer	1	UPTD Temanggung
56	Rak Buku	1	UPTD Temanggung
57	Kursi Busa	3	UPTD Temanggung
58	Kursi Penjalin	16	UPTD Temanggung
59	Feeling Kabinet	4	UPTD Temanggung
60	Almari Arsip	1	UPTD Temanggung
61	Komputer	1	UPTD Temanggung
62	Mesin Ketik	2	UPTD Temanggung
63	Meja Gambar	1	UPTD Temanggung
64	Printer	1	UPTD Temanggung
Jumlah		45	
PERLENGKAPAN UPT PEMADAM KEBAKARAN			
65	meja	3	UPT Pemadam Kebakaran
66	Almari	3	UPT Pemadam Kebakaran
67	Peta Kabupaten	1	UPT Pemadam Kebakaran

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang / Register (bh)	Lokasi Barang
68	Kursi	2	UPT Pemadam Kebakaran
69	White Board	1	UPT Pemadam Kebakaran
Jumlah		10	
PERLENGKAPAN SEKRETARIAT			
70	Meja Kerja	3	Sekretariat
71	Meja Kerja Kayu	17	Sekretariat
72	Meja Eselon	1	Sekretariat
73	Meja Tamu/Kursi	1	Sekretariat
74	Meja Komputer	5	Sekretariat
75	Kursi putar	5	Sekretariat
76	Kursi lipat	6	Sekretariat
77	Kursi busa	8	Sekretariat
78	Kursi Kayu Rotan	30	Sekretariat
79	Feeling Kabinet	10	Sekretariat
80	Almari Besi	2	Sekretariat
81	Almari Kayu	2	Sekretariat
82	Almari Rak Buku	6	Sekretariat
83	Kursi Busa	8	Sekretariat
84	Almari Arsip	5	Sekretariat
85	Mesin Ketik	2	Sekretariat
86	Komputer	5	Sekretariat
87	Printer	7	Sekretariat
88	Laptop	4	Sekretariat
89	LCD Proyektor	1	Sekretariat
90	Mesin Faximile	1	Sekretariat
91	Kipas Angin Gantung	1	Sekretariat

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang / Register (bh)	Lokasi Barang
92	Peta Kab Temanggung	1	Sekretariat
93	Jam Dinding	0	Sekretariat
94	Brangkas	2	Sekretariat
95	Foto Presiden dan Wakil Presiden	2	Sekretariat
Jumlah		135	
PERLENGKAPAN BIDANG TATA KOTA			
96	Meja Kerja Kabid	2	Tata Kota
97	Meja Kasi	3	Tata Kota
98	Meja Kerja	18	Tata Kota
99	Meja Tamu/Kursi	1	Tata Kota
100	Kursi Putar	4	Tata Kota
101	Kursi	23	Tata Kota
102	Feeling Kabinet	8	Tata Kota
103	Almari Data	1	Tata Kota
104	Mesin Ketik	2	Tata Kota
105	Komputer	3	Tata Kota
106	Gambar Presiden/Wakil	1	Tata Kota
107	Lambang Garuda	1	Tata Kota
Jumlah		67	
PERLENGKAPAN BIDANG CIPTA KARYA DAN TATA RUANG			
108	Meja Kerja	19	Cipta Karya & Tata Ruang
109	Meja Besar	1	Cipta Karya & Tata Ruang
110	Meja Gambar	4	Cipta Karya & Tata Ruang
111	Meja Tamu/Kursi	1	Cipta Karya & Tata Ruang
112	Meja/Rak	1	Cipta Karya & Tata Ruang

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang / Register (bh)	Lokasi Barang
113	Kursi Putar	4	Cipta Karya & Tata Ruang
114	Kursi Gambar	1	Cipta Karya & Tata Ruang
115	Kursi Kayu	15	Cipta Karya & Tata Ruang
116	Feeling Kabinet	5	Cipta Karya & Tata Ruang
117	Almari/Rak Arsip	3	Cipta Karya & Tata Ruang
118	Almari	5	Cipta Karya & Tata Ruang
119	Almari Besi	1	Cipta Karya & Tata Ruang
120	Mesin Ketik	5	Cipta Karya & Tata Ruang
121	Komputer	1	Cipta Karya & Tata Ruang
122	Printer	1	Cipta Karya & Tata Ruang
123	Note Book	1	Cipta Karya & Tata Ruang
124	Camera	1	Cipta Karya & Tata Ruang
Jumlah		69	
PERLENGKAPAN BIDANG SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN JASA KONSTRUKSI			
125	Meja Kerja	20	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi
126	Kursi Lipat	15	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi
127	Kursi Kayu	11	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang / Register (bh)	Lokasi Barang
128	Feeling Kabinet	16	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi
129	Almari Besi	2	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi
130	Almari Kayu	2	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi
131	Komputer	3	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi
132	Printer	3	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi
133	Laptop	5	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi
130	Kamera Digital	4	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi
131	Handycam	1	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang / Register (bh)	Lokasi Barang
132	Wireless Ampifier	1	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi
133	Lcd Proyektor	1	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi
134	Telepon	2	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi
135	Papan Elektronik	1	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi
136	GPS	3	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi
137	UPS	2	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi
138	Faximile	1	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi
139	Kipas Angin	1	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi
140	Peta Kab. Temanggung	1	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang / Register (bh)	Lokasi Barang
141	Jam Dinding	0	Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jasa Konstruksi
Jumlah		95	
PERLENGKAPAN BIDANG JALAN DAN JEMBATAN			
142	Meja	19	Bidang Jalan & Jembatan
143	Meja Gambar	4	Bidang Jalan & Jembatan
144	Meja Tamu/Kursi	1	Bidang Jalan & Jembatan
145	Meja Komputer	4	Bidang Jalan & Jembatan
146	Kursi Gambar	4	Bidang Jalan & Jembatan
147	Kursi Kayu	19	Bidang Jalan & Jembatan
148	Feeling Kabinet	9	Bidang Jalan & Jembatan
149	Almari Kayu	2	Bidang Jalan & Jembatan
150	Almari Besi	3	Bidang Jalan & Jembatan
151	Lemari Kaca	1	Bidang Jalan & Jembatan
152	Mesin Ketik	2	Bidang Jalan & Jembatan
153	Komputer	2	Bidang Jalan & Jembatan
154	Printer	3	Bidang Jalan & Jembatan
155	Laptop	1	Bidang Jalan & Jembatan
Jumlah		74	
PERLENGKAPAN KEPALA DINAS/SEPRI			
156	Meja Kerja	2	Kadin/Sepri
157	Meja Kerja B/k	1	Kadin/Sepri
158	Meja Tamu/Kursi Ukir	2	Kadin/Sepri
159	Meja Rapat	1	Kadin/Sepri
160	Meja Telepon	1	Kadin/Sepri

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang / Register (bh)	Lokasi Barang
161	Meja Telepon Kecil	1	Kadin/Sepri
162	Kursi Putar	3	Kadin/Sepri
163	Kursi Lipat	21	Kadin/Sepri
164	Feeling Kabinet	1	Kadin/Sepri
165	Almari Kaca B	1	Kadin/Sepri
167	telepon	2	Kadin/Sepri
168	Peta Kab. temanggung	1	Kadin/Sepri
169	Whiteboard	2	Kadin/Sepri
170	Jam Dinding	0	Kadin/Sepri
171	Gambar Presiden/Wakil	1	Kadin/Sepri
172	Foto Mantan Kepala DPU	9	Kadin/Sepri
Jumlah		49	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum meliputi pelaksanaan dalam bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang penataan ruang, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang lingkungan hidup, bidang jasa konstruksi, dan pemadam kebakaran. Hal tersebut membawa konsekuensi tanggung jawab pengelolaan yang harus semakin meningkat dalam kuantitas dan kualitasnya di seluruh Kabupaten Temanggung. Penanganan infrastruktur yang merata dan berkualitas memerlukan perencanaan yang visioner sejalan dengan tantangan kedepan yang semakin kompleks.

Adapun dalam pelayanan Dinas Pekerjaan Umum telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. SPM Bidang Perumahan Rakyat
2. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. SPM Bidang Pemerintahan dalam Negeri

Capaian Standar Pelayanan minimal di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

1. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 7
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	INDIKATOR SPM	CAPAIAN		Target Nasional	
		2013		Tahun	Nilai
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	156458	79,47%	2025	100%
		196879			
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	804	6,96%	2025	70%
		11549			
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	47	16,26%	2025	100%
		289			

Dari tabel 7 diatas diketahui bahwa capaian SPM untuk bidang Perumahan Rakyat akan tercapai 100% di tahun 2025, sepanjang semua sektor mendukung. Kendala yang dihadapi untuk pencapaian SPM bidang perumahan rakyat adalah belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni.

Kendala tersebut diakibatkan belum optimalnya program dan tidak sinkronnya kebijakan pemenuhan rumah layak huni antara stakeholder dan juga belum tersedianya data yang valid tentang pemetaan rumah yang tidak layak huni.

2. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 8
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR SPM	CAPAIAN		Target Nasional	
		2013		Tahun	Nilai
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Tersedianya air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari hari	509,40	95,14%	2014	100%
		535,40			
2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	226,974	91,67%	2014	70%
		247,60			
3	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	604,863	81,83%	2014	100%
		739,127			
4	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan	604,863	81,83%	2014	100%
		739,127			
5	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	520,811	70,46%	2014	60%
		739,127			
6	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	604,863	81,83%	2014	60%
		739,127			
7	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan dengan sesuai kecepatan rencana	604,863	81,83%	2014	60%
		739,127			

NO	INDIKATOR SPM	CAPAIAN		Target Nasional	
		2013		Tahun	Nilai
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
8	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter per orang per hari	642.750	84,01%	2014	100%
		765.083			
9	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	0	0%	2014	60%
		0			
10	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	47515	6,21%	2014	5%
		765083			
11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	5,1	15,45%	2014	20%
		33			
12	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	127,0	76,05%	2014	70%
		167			
13	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	58741,77	7,95%	2014	50%
		739127			
14	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	4,55	2%	2014	10%
		235			
15	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kab/kota	1071	100%	2014	100%
		1071			
16	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota	1	100%	2014	100%
		1			
17	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	22	100%	2014	100%
		22			
18	Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi setiap tahun	5	100%	2014	100%
		5			

NO	INDIKATOR SPM	CAPAIAN		Target Nasional	
		2013		Tahun	Nilai
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
19	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	100%	2014	100%
		100%			
20	Terlaksananya penjarangan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	40	100%	2014	100%
		40			
21	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya.	1	50%	2014	100%
		2			
22	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	1	33,33%	2014	100%
		3			
23	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	2	10%	2014	25%
		20			

Dari tabel 8 diatas bahwa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercapai 100% di tahun 2014. Pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkendala pada indikator SPM tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter per orang per hari.

Kendala dari indikator tersebut diatas dikarenakan adanya permasalahan yaitu tidak terdapatnya sumber mata air yang secara teknis memenuhi syarat untuk SPAM. Sedangkan alternatif sumur dalam juga terkendala karena muka air tanah yang tidak memungkinkan.

Untuk indikator tersedianyasistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota belum bisa terpenuhi karena Kabupaten Temanggung belum memiliki IPLT, tahun 2014 baru dalam tahap penyediaan sarpras IPLT.

3. Capaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Tabel 9
Capaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

NO	INDIKATOR SPM	CAPAIAN		Target Nasional	
		2013		Tahun	Nilai
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Persentase aparaturnyapadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	2	11,76%	2015	85%
		17			
2	Jumlah/mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK	5	125%	2015	95%
		4			
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	176,62	20%	2015	80%
		870,65			
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	19	65,5%	2015	75%
		29			

Dari tabel 9 dapat dijelaskan bahwa capaian SPM untuk bidang Pemerintahan Dalam Negeri tercapai di tahun 2015. Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian SPM adalah Kurangnya personil pemadam kebakaran, Luasnya wilayah geografis yang harus dilayani dan sarana dan prasarana yang belum optimal.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung juga mengerjakan urusan pilihan yaitu bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Belum ada Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetapi dalam pelayanan harus sesuai dengan standar pelayanan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung meliputi :

1. Izin retribusi tanah pengairan
2. Izin pemakaian kekayaan daerah (Reklame)
3. Jasa pelayanan persampahan/kebersihan
4. Izin pemasangan lampu penerangan jalan umum
5. Izin pemotongan pohon ayoman jalan, pembongkaran taman dan trotoar
6. Izin pemakaian alat berat.

Sedangkan capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2009 – 2013 dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2009 – 2013 dengan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 10
Capaian Kinerja Sasaran Pekerjaan Umum

No	Sasaran	Program	Indikator Sasaran	Target RPJMD	Realisasi	%	
1	Terwujudnya pemerataan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan infrastruktur ekonomi pedesaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	1	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana jalan : (KM)	73	76.50	100
			2	Pemeliharaan rutin jembatan (bh)	41	32	78.05

			3	Pemeliharaan berkala jembatan (bh)	19	10	52.63	
			4	Pemeliharaan berkala jalan (KM)	42	50.79	100	
			5	% panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	70	85.42	100	
		Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan	1	Peningkatan Jalan Aspal Hotmix (Km)	41	44.33	100	
			2	Peningkatan jalan dari batu (Km)	29	41.68	100	
		Pembangunan dan peningkatan Jembatan	3	Pembangunan jalan dari tanah (Km)	7.7	9.7	100	
			1	Pembangunan/Peningkatan jembatan (bh)	12	15	100	
		Peningkatan sarana dan prasarana Ke PU-an	1	Terpeliharanya alat-alat berat mesin gilas	3 bh	5 bh	100	
		Pembangunan infrastruktur pedesaan	1	Bertambahnya jumlah ruas jalan pedesaan beraspal	44	27	61.36	
		Pengendalian banjir	1	Peningkatan pemeliharaan/pembangunan drainase perkotaan (Km)	2	1,345	67,25	
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengereng serta Pengendalian air	1	Pembangunan Bendung (bh)	4	3	75	
			2	Pembangunan Jaringan irigasi (km)	2	2,75	100	
			3	Pemeliharaan Bendungan (bh)	5	20	100	
			4	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (km)	10	36,67	100	
			5	Pemeliharaan pintu Air (bh)	5	10	100	
			6	Prosentase luas irigasi dalam kondisi baik	42	53	100	
Rata - Rata Capaian Sasaran								92,17
2	Meningkatnya Pembangunan	Pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan	1	Pemeliharaan trotoar (Kecamatan)	13	21	100	
			2	Pembangunan trotoar (Km)	7.25	7,918	100	
Rata - Rata Capaian Sasaran								100
3	Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan gedung	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1	Pendataan bangunan gedung milik Pemda di 20 Kecamatan (%)	80	60	75	
			2	Peningkatan Pembangunan / Pemeliharaan Gedung (Unit)	10	14	100	
			3	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan (unit)	3	3	100	
Rata - Rata Capaian Sasaran								91.67

Tabel 11
Capaian Kinerja Sasaran Perumahan Rakyat

No	Sasaran	Program	Indikator Sasaran	Target RPJMD	Realisasi	%	
1	Terwujudnya lingkungan perumahan yang serasi dan teratur	Program pengembangan perumahan	1	Peningkatan Jumlah permukiman yang layak,sehat, aman, serasi dan teratur (kawasan)	4	3	75
			2	Penambahan Sarana dan Prasarana Air Bersih (layanan)	120	122	100
		Program lingkungan sehat perumahan	1	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dasar Permukiman (kawasan)	7	9	100
			2	% ketersediaan drainase permukiman yang menampung limpasan air hujan dan mencegah banjir di area permukiman	5	5	100
		Pemberdayaan komunitas perumahan	1	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan	5	3	60
		Rata - Rata Capaian Sasaran dan urusan					

Tabel 12
Capaian Kinerja Sasaran Penataan Ruang

No	Sasaran	Program	Indikator Sasaran	Target RPJMD	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Pemanfaatan dan Pengendalian ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang	1	Peningkatan perijinan bangunan	15%	15%	100
		Program Pemanfaatan ruang	1	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang (tidak sesuai RTRW)	15%	15%	100
		Pemanfaatan ruang	1	Peningkatan jumlah papan reklame (Unit)	4	6	100
			2	Jumlah Pengumpulan data pemanfaatan ruang (Kelurahan/ Desa)	148	50	33.78
Rata - Rata Capaian Sasaran dan urusan						83,44	

Tabel 13

Capaian Kinerja Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sasaran
Meningkatnya Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam

No	Sasaran	Program	Indikator Sasaran	Target RPJMD	Realisasi	%
1	Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 Volume sampah yang tertangani (m3/hari)	141	170.95	100
		Peningkatan Pengendalian Polusi	1 Meningkatnya kelompok masyarakat pengelola sampah berbasis 5R (reuse, reduce, recycle, rethink, recovery) (%)	20	8	40
No	Sasaran	Program	Indikator Sasaran	Target RPJMD	Realisasi	%
			2 Rata-rata tingkat pencemaran limbah pada air sungai (Persentase dari semua parameter yang di uji) (%)	5.88	14.26	0
			3 Rata-rata tingkat pencemaran udara (Persentase dari semua parameter yang di uji) (%)	7.14	0	100
			1 Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) (%)	17	11.23	66.06
				2 Meningkatnya tegakan jalur hijau pada jalan antar desa dan jalan kabupaten	45,000	31,911
		Peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	1 Tersusunnya buku SLHD tiap tahun	4	4	100
		Perlindungan dan konservasi Sumber daya alam	1 Terlaksananya konservasi lahan di kawasan Sindoro, Sumbing dan Prau (Ha)	1,400	1,752.00	100
			2 Luas lahan bekas galian gol C yang terreklamasi (Ha)	30	13	43.33
Rata – Rata Capaian Sasaran						57,81
2	Meningkatnya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam	Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	1 Meningkatnya peran serta masyarakat, pengusaha dan instansi pelayanan dalam penyediaan kebutuhan bibit	8.5 Jt	8 Jt	94.11
		Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	1 Meningkatnya kebersihan, ketertiban,keindahan, kesehatan lingkungan masyarakat perkotaan	69%	71.35%	100

		Penegakan hukum lingkungan	1	Terwujudnya Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam lima tahun ke depan	3	4	100
			2	Tidak terjadinya pelanggaran lingkungan (kasus)	0	2	0
Rata – Rata Capaian Sasaran							73,53

Khusus untuk capaian kinerja Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup dan Sasaran Meningkatnya Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam Dinas Pekerjaan Umum hanya mengerjakan program pengembangan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan indikator sasaran Volume sampah yang tertangani (m³/hari).

Tabel 14
Capaian Kinerja Sasaran Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Terwujudnya tertib pengelolaan kawasan pertambangan	Pembinaan dan Pengawasan	1	Jumlah kumulatif surat keterangan pemanfaatan bahan galian golongan C	40	0	0%
			2	Jumlah kumulatif usaha pertambangan dan energy yang terbina	40	54	100%
			3	Pertambangan golongan C tanpa ijin (%)	55	0	0%
			4	Menurunnya jumlah pelanggaran perusakan lingkungan pada areal pertambangan (kasus)	70	0	0%
			5	Penurunan Pemakaian energi (%)	3,25	68,89	100%
			6	Peningkatan prosentase jumlah rumah tangga menggunakan listrik	79	82,37	100%
Rata-rata Capaian Urusan						50%	

Target pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran terwujudnya tertib pengelolaan kawasan pertambangan tercapai sebesar 50%.

Dalam urusan energi dan sumber daya mineral masih banyak indikator yang mencapai target, hal ini disebabkan karena Kabupaten Temanggung bukan merupakan wilayah penambangan Penambangan batu alam dan kewenangannya ada di Pemerintah Propinsi hal ini juga dipengaruhi oleh minimnya parameter dan alat ukur yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap indikator yang telah ditetapkan. Kedepan perlu dirumuskan indikator sasaran yang tepat untuk menggambarkan kinerja urusan ESDM secara keseluruhan.

Pencapaian pelayanan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung berdasarkan rencana strategi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung tahun 2009 – 2013 dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2009 – 2013 dengan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 15
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
A	SPM																		
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100% (th 2025)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,47%	-	-	-	-	-
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70% (th 2025)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,96%	-	-	-	-	-
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100% (th 2025)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,26%	-	-	-	-	-
4	Tersedianya air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari hari	100% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,14%	-	-	-	-	-
5	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	70% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,67%	-	-	-	-	-
6	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	100% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,83%	-	-	-	-	-
7	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan	100% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,83%	-	-	-	-	-
8	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,46%	-	-	-	-	-
9	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,83%	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
10	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan dengan sesuai kecepatan rencana	60% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,83%	-	-	-	-	-
11	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter per orang per hari	100% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,01%	-	-	-	-	-
12	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	60% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
13	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,21%	-	-	-	-	-
14	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,45%	-	-	-	-	-
15	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	70% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,05%	-	-	-	-	-
16	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,95%	-	-	-	-	-
17	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2%	-	-	-	-	-
18	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kab/kota	100% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
19	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota	100% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
20	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	100% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
21	Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi setiap tahun	100% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
22	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
23	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	100% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
24	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya.	100% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	-
25	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	100% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,33%	-	-	-	-	-
26	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	25% (th 2014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
27	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85% (th 2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,76%	-	-	-	-	-
28	Jumlah/mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK	95% (th 2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125%	-	-	-	-	-
29	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	80% (th 2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	-	-	-	-	-
30	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75% (th 2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B IKK																			
1	Penanganan sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,40 %	-	-	-	-	-
2	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,379	-	-	-	-	-
3	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,75%	-	-	-	-	-
4	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53%	-	-	-	-	-
5	Rumah Tangga Per Sanitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,83%	-	-	-	-	-
6	Kawasan Kumuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27%	-	-	-	-	-
7	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Rumah tangga pengguna air bersih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,65%	-	-	-	-	-
9	Lingkungan pemukiman kumuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27%	-	-	-	-	-
10	Rumah layak huni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,88%	-	-	-	-	-
11	Pertambangan tanpa ijin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
C	Renstra SKPD 2009-2013																			
1	Pemeliharaan rutin jalan dan prasarana jalan	-	-	-	15	17	19	22	25	15	17	22,5	22	25	100,00	100,00	118,42	100,00	100,00	
2	Pemeliharaan rutin jembatan	-	-	-	10	12	14	5	7	-	2	15	5	7	0,00	16,67	107,14	100,00	100,00	
3	Pemeliharaan berkala jembatan	-	-	-	6	6	7	-	-	-	2	4	4	0	0,00	33,33	57,14	-	-	
4	Pemeliharaan berkala jalan	-	-	-	10	10	12	10	11	-	7,9	24,89	18	9,18	0,00	79,00	207,42	180,00	119,83	
5	% panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	-	-	-	74,57	75	76	70	72	63,80	66	74	74	70	85,56	88,00	97,37	105,71	102,86	
6	Peningkatan Jalan Aspal Hotmix (Km)	-	-	-	10	10	10	11	11	14	4	11,33	15	47	140,00	40,00	113,30	136,36	23,40	
7	Peningkatan jalan dari batu (Km)	-	-	-	7	7	8	7	7	11	2	13,29	15,39	7	157,14	28,57	166,13	219,86	100,00	
8	Pembangunan jalan dari tanah (Km)	-	-	-	0	0	4,7	3	3	0	2	4,7	3	0	-	-	100,00	100,00	-	
9	Pembangunan/Peningkatan jembatan (bh)	-	-	-	3	3	3	3	3	4	2	5	4	3	133,33	66,67	166,67	133,33	100,00	
10	Terpeliharanya alat-alat berat mesin gilas	-	-	-	0	0	1	2	3	-	-	3	2	3	-	-	300,00	100,00	100,00	
11	Bertambahnya jumlah ruas jalan pedesaan beraspal	-	-	-	7	9	11	17	19	-	3	11	13	14	-	33,33	100,00	76,47	135,71	
12	Peningkatan pemeliharaan/pembangunan drainaseperkotaan (Km)	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	1	-	0,5	0,195	0	1,039	-	100,00	39,00	0,00	96,25	
13	Pembangunan Bendung (bh)	-	-	-	-	-	-	4	5	6	5	4	3	0	-	-	-	75,00	-	
14	Pembangunan Jaringan irigasi (km)	-	-	-	-	-	-	2	2	1,9	0,38	0,45	2	0	-	-	-	100,00	-	
15	Pemeliharaan Bendungan (bh)	-	-	-	-	-	-	5	6	9	6	2	3	7	-	-	-	60,00	85,71	
16	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (km)	-	-	-	-	-	-	10	11	-	10,5	2	12	10	4,5	-	-	-	100,00	244,44
17	Pemeliharaan pintu Air (bh)	-	-	-	-	-	-	5	5	-	3	2	5	3	-	-	-	100,00	166,67	
18	Prosentase luas irigasi dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	42%	42%	-	-	38,5	45	48,57	-	-	-	10714,29	0,86	
19	Pemeliharaan trotoar (Kecamatan)	-	-	-	4		4	5	5	6	3	6	6	6	150,00	-	150,00	120,00	83,33	
20	Pembangunan trotoar (Km)	-	-	-	1	1,5	2	2,75	3	1	1,5	1,649	1,649	2,32	100,00	100,00	82,45	59,96	129,31	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
21	Pendataan bangunan gedung milik Pemda di 20 Kecamatan (%)	-	-	-	20	40	60	80	100	20	40	60	0	100	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
22	Peningkatan Pembangunan / Pemeliharaan Gedung (Unit)	-	-	-	4	2	2	2	2	4	2	6	1	1	100,00	100,00	300,00	50,00	200,00
23	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan (unit)	-	-	-	-	-	1	2	0	-	-	1	3	0	-	-	100,00	150,00	-
24	Volume sampah yang tertangani (m3/hari)	-	-	-	135	138	140	141	142	135	140	130,03	170,95	182,25	100,00	101,45	92,88	121,24	128,35
25	Jumlah Kumulatif Surat Keterangan Pemanfaata Bahan Galian Gol C	-	-	-	5	20	30	40	50	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
26	Jumlah kumulatif usaha pertambangan dan energi yang terbina	-	-	-	-	20	20	40	50	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
27	% pertambangan Golongan C tanpa ijin	-	-	-	97,5	85	65	55	40	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
28	Menurunnya jumlah pelanggaran perusakan lingkungan pada areal pertambangan (kasus)	-	-	-	100	90	80	70	60	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
29	Penurunan pemakaian energi (%)	-	-	-	2,5	2,75	3	3,25	4	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
30	Peningkatan Prosentase Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Listrik	-	-	-	-	-	-	79	80	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
31	Peningkatan Jumlah permukiman yang layak,sehat, aman, serasi dan teratur (kawasan)	-	-	-	1	-	-	3	4	-	-	-	-	6	0,00	-	-	0,00	66,67
32	Penambahan Sarana dan Prasarana Air Bersih (layanan)	-	-	-	30	30	30	30	30	-	-	-	3	41	0,00	0,00	0,00	10,00	73,17
33	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dasar Permukiman (kawasan)	-	-	-	1	1	3	2	2	-	2	3	22	0	0,00	200,00	100,00	1100	-
34	% ketersediaan drainase permukiman yang menampung limpasan air hujan dan mencegah banjir di area permukiman	-	-	-	-	-	5	5	5	-	-	8	5	5	-	-	160,00	100,00	100,00
35	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan	-	-	-	-	-	5	5	5	-	0	8	5	6	-	-	160,00	100,00	83,33
36	Peningkatan perijinan bangunan	-	-	-	15%	15%	15%	15%	15%	7,8%	-	-	13	166	52,00	-	-	86,67	0,09

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
37	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang (tidak sesuai RTRW)	-	-	-	30	25	20	15	10	30	-	15	15	0	100,00	0,00	75,00	100,00	-
38	Peningkatan jumlah papan reklame (Unit)	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	1	0	2	-	-	50,00	0,00	100,00
39	Jumlah Pengumpulan data pemanfaatan ruang	-	-	-	30	38	40	40	50	30			20	-	100,00	0,00	0,00	50,00	-
	(Kelurahan/ Desa)																		

Tabel 15 tersebut diatas menggambarkan pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung yang dilihat dari 3 variabel yaitu indikator kinerja yang dilihat dari SPM, IKK dan Target Renstra 2009 – 2013. Pencapaian kinerja tersebut sebagai bahan evaluasi tentang pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung, diharapkan dengan hasil evaluasi tersebut sebagai bahan awal atau kondisi eksisting untuk peningkatan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung untuk lima tahun ke depan dalam kurun waktu 2014 – 2018. Dari indikator kinerja SPM rata – rata sebagian belum tercapai karena target capaian SPM.

Indikator Kinerja Kunci sebagian juga belum tercapai karena berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang selalu berkembang secara dinamis. Variabel IKK ini yang tidak tercapai diantaranya penanganan sampah yang masih 11, 04%, dikarenakan keterbatasan personil dan sumber daya lainnya dalam memperluas cakupan pelayanan sampah se Kabupaten Temanggung. Variabel IKK lainnya seperti rumah tangga pengguna air bersih tercapai 81, 65% hal tersebut belum bisa sepenuhnya tercapai karena keterbatasan sumber mata air dibandingkan dengan besaran jumlah cakupan pelayanan. Indikator kinerja dilihat dari Rencana Strategis 2009 – 2013 ada yang sebagian besar melampaui target seperti pembangunan jalan hotmix yang ditarget 11 km tercapai 47 km atau prosentase luas irigasi dari target 42% terealisasi 48%. Dari target renstra 2009

– 2013 yang tidak tercapai pembangunan jalan dari tanah dari target 3 km dengan realisasi 0 km, hal ini dikarenakan penanganan jalan yang ditangani berupa peningkatan kualitas konstruksi dari jalan batu menjadi jalan aspal atau beton.

Tabel 16

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung	49.933.519.250	28.050.939.416	59.587.565.293	90.448.443.575	91.435.916.442	47.511.743.566	26.061.139.178	54.889.962.571	82.058.741.099	83.755.842.783	95,15	92,91	92,12	90,72	91,60	16,6	15,16

Berdasarkan tabel 18 tentang anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dalam kurun 5 tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat tergambar bahwa adanya peningkatan anggaran yang cukup signifikan dari tahun 2009 dengan alokasi anggaran Rp 49.933.519.250,00 melonjak menjadi Rp 91.435.916.442,00 pada akhir tahun perencanaan (2013). Dari data tersebut dapat terbaca bahwa rata – rata kenaikan anggaran sebesar 16,6% setiap tahunnya. Rata – rata pertumbuhan anggaran tersebut menggambarkan komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung untuk peningkatan pelayanan di bidang infrastruktur ke PU an.

Komitmen pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung untuk menjalankan anggaran secara profesional, transparan dan akuntabel dapat terbaca juga penyerapan realisasi anggaran yang setiap tahunnya naik dengan rata – rata pertumbuhan 15,16%.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Dalam mengimplementasikan Renstra ini, ada beberapa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung. Tantangan dan peluang tersebut ada di lima urusan wajib dan pilihan yang merupakan tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung. Tantangan dan peluang ini perlu ditelaah guna pengembangan pelayanan untuk mengoptimalkan fungsi organisasi yang dijabarkan dalam Renstra dan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung berdasarkan urusannya adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pekerjaan Umum tantangan yang dihadapi adalah;
 - a) Terbatasnya jumlah pegawai dari sisi kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan tantangan dan harapan masyarakat akan infrastruktur Pekerjaan Umum yang memadai;
 - b) Belum bisa optimal dalam proses percepatan pelaksanaan pekerjaan dari waktu pelelangan sampai dengan pelaksanaan;
 - c) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum.
2. Urusan Penataan Ruang tantangan yang dihadapi adalah;
 - a) Semakin tumbuhnya sektor industri yang bisa mengakibatkan banyaknya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian;
 - b) Meningkatnya jumlah pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang belum diiringi dengan kesadaran ketaatan pemanfaatan ruang.
3. Urusan Lingkungan Hidup tantangan yang dihadapi adalah;
 - a) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan seperti tidak berjalanya proses pemilahan sampah di tingkat rumah tangga;

- b) Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah disisi lain semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan pelayanan pengelolaan persampahan, terutama wilayah Kabupaten Temanggung bagaian utara, belum ada TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah;
 - c) Terbatasnya SDM dalam sisi kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan sampah;
4. Urusan Perumahan Rakyat tantangan yang dihadapi adalah ;
- a) Masih adanya kawasan masuk kategori kawasan yang kumuh
 - b) Kurangnya sarpras lingkungan pemukiman seperti MCK, SPAL, Air bersih dan jalan lingkungan.
5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tantangan yang dihadapi adalah;
- a) Masih Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan;
 - b) Keterbatasan personil dalam pengawasan penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan.
6. Urusan Pemerintahan dalam Negeri tantangan yang dihadapi adalah :
- a) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi timbulnya kebakaran sehingga kebakaran yang terjadi masih cukup tinggi;
 - b) Masihrendahnya cakupan pelayanan bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Temanggung;
 - c) Keterbatasan personil, sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Sedangkan Peluang pengembangan pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung dijelaskan sebagai berikut :

1. Urusan Pekerjaan Umum :
- a) Usulan penambahan pegawai baru, pelatihan teknis bagi pegawai yang sudah ada dan melakukan perekutan terhadap pegawai kontrak atau penyedia jasa konsultan;

- b) Melaksanakan perencanaan teknis lebih awal (Tahun-1) untuk kegiatan yang akan datang sehingga diawal tahun dapat langsung diproses pengadaannya;
 - c) Koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi untuk permohonan bantuan perbaikan infrastruktur di Kabupaten Temanggung.
2. Urusan Penataan Ruang :
- a) Penyusunan Perda atau Peraturan Bupati yang mengatur pemanfaatan ruang/lahan khusus untuk kawasan strategis atau industri, untuk menghindari semakin banyaknya konversi lahan pertanian teknis;
 - b) Perlunya penegakan hukum bagi pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW/RDTRK atau atauran penataan ruang lainnya.
3. Urusan Lingkungan Hidup :
- a) Peningkatan program pembinaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan seperti pengembangan bank sampah;
 - b) Pemerintah Kabupaten Temanggung berusaha mencari bantuan program ke Kementrian Pekerjaan Umum dan Dinas Cipta Karya Provinsi;
 - c) Perlunya peningkatan kemampuan SDM dalam sisi kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan sampah lewat diklat dan sejenisnya;
 - d) Perlunya perluasan pelayanan sampah secara merata di seluruh kecamatan;
 - e) Memperkecil jarak antara sumber sampah dengan TPA.
4. Urusan Perumahan Rakyat :
- a) Berkoordinasi dengan pemerintah pusat lewat Kementrian Pekerjaan Umum dan Dinas Cipta Karya Provinsi untuk permohonan bantuan program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) untuk mengurangi kawasan kumuh;
 - b) Memperbanyak program yang berbasis seperti MCK, SPAL, Air bersih dan jalan lingkungan.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral :
 - a) Melaksanakan monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan.
 - b) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Terkait untuk Pengendalian dan pengawasan penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan.
6. Urusan Pemerintah Dalam Negeri :
 - a) Melaksanakan sosialisasi tentang bahaya dan pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan industri;
 - b) Mengembangkan CSR dengan swasta untuk mendukung kecukupan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - c) Memperkecil cakupan pelayanan bencana kebakaran sehingga tingkat waktu tanggap bencana menjadi baik.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung lebih dari satu urusan, yaitu :

1. Urusan Pekerjaan Umum meliputi antara lain :
 - a. Jalan dan jembatan
 - b. Irigasi dan air tanah
 - c. Air bersih, air limbah, drainase, dan trotoar
2. Urusan Perumahan Rakyat meliputi antara lain :
 - a. Rumah tidak layak huni
 - b. Perumahan pada daerah rawan bencana
 - c. Permukiman kumuh di kawasan perkotaan
 - d. Sarana dan prasarana lingkungan sehat di kawasan permukiman
 - e. Air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)
3. Urusan Penataan Ruang meliputi antara lain:
 - a. Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah
4. Urusan Lingkungan Hidup meliputi antara lain:
 - a. Persampahan
5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi antara lain :
 - a. Penambangan batuan
 - b. Energi terbarukan
 - c. Penerangan jalan umum

6. Urusan Pemerintahan Dalam Negeri meliputi antara lain :

a. Pemadam Kebakaran

Permasalahan yang timbul karena kondisi dari beberapa urusan tersebut masih belum memenuhi standar pelayanan minimal diantaranya :

a. Pekerjaan Umum

- 1.) Masih adanya jalan, jembatan, drainase, dan trotoar dengan kondisi yang rusak ringan dan rusak berat;
- 2.) Belum optimalnya sistem informasi infrastruktur daerah;
- 3.) Rendahnya ketersediaan jalan alternatif sebagai pengurai kepadatan lalu lintas;
- 4.) Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pelayanan air bersih;
- 5.) Rendahnya pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan air tanah;
- 6.) Banyaknya jaringan irigasi yang tidak terpelihara dengan baik dan masih rendahnya upaya pembangunan jaringan irigasi baru.

b. Perumahan Rakyat

- 1.) Banyaknya rumah tidak layak huni;
- 2.) Adanya kawasan permukiman yang berada di daerah rawan bencana;
- 3.) Adanya permukiman kumuh di kawasan perkotaan;
- 4.) Sarana dan prasarana lingkungan sehat di kawasan permukiman masih belum memenuhi standart.
- 5.) Masih kurangnya penyediaan infrastruktur dasar air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL).

c. Penataan Ruang

- 1.) Belum ditetapkannya rencana detail tata ruang dan belum tersusunnya dokumen lain yang diamanatkan dalam RTRW;

- 2.) Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah;
- 3.) Belum optimalnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

d. Lingkungan Hidup

- 1.) Belum optimalnya penanganan sampah, khususnya sampah dipermukiman dan industri;
- 2.) Masih rendahnya cakupan pelayanan sampah di Kabupaten Temanggung;
- 3.) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan; kebijakan
- 4.)
- 5.) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1.) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang energi baru terbarukan sebagai bahan pengganti bahan bakar fosil;
- 2.) Masih adanya kegiatan penambangan yang menyebabkan kerugian materiil maupun kerusakan lingkungan;
- 3.) Kurangnya cakupan pelayanan Lampu Penerangan Jalan Umum.

f. Pemerintahan Dalam Negeri

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha mengenai bahaya kebakaran;
- 2) Masih rendahnya cakupan wilayah pelayanan bencana kebakaran.

Lebih jelasnya Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD di jabarkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 17

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Jalan dan jembatan b. Irigasi dan air tanah c. Air bersih, air limbah, drainase, dan trotoar	<p>Masih adanya jalan, jembatan, drainase, dan trotoar dengan kondisi yang rusak ringan dan rusak berat;</p> <p>Belum optimalnya sistem informasi infrastruktur daerah;</p> <p>Rendahnya ketersediaan jalan alternatif sebagai pengurai kepadatan lalu lintas;</p> <p>Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pelayanan air bersih;</p> <p>Rendahnya pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan air tanah;</p> <p>Banyaknya jaringan irigasi yang tidak terpelihara dengan baik dan masih rendahnya upaya pembangunan jaringan irigasi baru.</p>	Spm/indikator rpjmd	<p>Kurangngya anggaran Pemeliharaan</p> <p>Belum adanya data terintegrasi se Kabupaten</p> <p>Kurangngya anggaran perencanaan global se kabupaten</p> <p>Terbatasnya anggaran untuk air bersih</p> <p>PERDA belum dibuat, belum ada pemetaan air tanah</p> <p>Kurangngya anggaran Pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi baru</p>	<p>Kurangngya kesadaran kesesuaian dalam penggunaannya</p> <p>Rendahnya kesadaran kebutuhan data</p> <p>Kesulitan pembebasan lahan</p> <p>Banyaknya permintaan pelayanan air bersih</p> <p>Banyaknya pemanfaat air tanah</p> <p>Kurangngya kesadaran pemeliharaan dan semakin berkurangnya lahan pertanian</p>	<p>Anggaran Pemeliharaan yang masih rendah</p> <p>Data terintegrasi se kabupaten belum tersedia</p>
d. Rumah tidak layak huni e. Perumahan pada daerah rawan bencana f. Permukiman kumuh di kawasan perkotaan g. Sarana dan prasarana lingkungan sehat di kawasan	<p>Banyaknya rumah tidak layak huni;</p> <p>Adanya kawasan permukiman yang berada di daerah</p>	Spm/indikator rpjmd	<p>Kurangngya data perumahan dan program belum berjalan maksimal</p> <p>Program belum berjalan maksimal, kurangnya sosialisasi</p>	<p>Rendahnya kesadaran kebutuhan rumah layak huni, pendapatan yang masih rendah</p> <p>Kesadaran masyarakat yang masih</p>	<p>Rendahnya kesadaran kebutuhan rumah layak huni, pendapatan yang masih rendah</p> <p>Kesadaran masyarakat yang masih</p>

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
permukiman h. Air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)	<p>rawan bencana;</p> <p>Adanya permukiman kumuh di kawasan perkotaan;</p> <p>Sarana dan prasarana lingkungan sehat di kawasan permukiman masih belum memenuhi standart.</p> <p>Masih kurangnya penyediaan infrastruktur dasar air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL).</p>		<p>Tata ruang belum bisa menyeluruh, pembangunan belum merata</p> <p>Kurangnya sosialisasi, kurangnya anggaran untuk lingkungan sehat</p> <p>Anggaran yang disediakan belum mencukupi, data belum memadai</p>	<p>rendah, tidak adanya pilihan lain</p> <p>Kesadaran masyarakat masih rendah</p> <p>Kurangnya lahan untuk penempatan sarana tempat sampah</p> <p>Kesadaran masyarakat masih rendah</p>	<p>rendah, tidak adanya pilihan lain</p> <p>Kesadaran masyarakat masih rendah</p> <p>Kurangnya lahan untuk penempatan sarana tempat sampah</p> <p>Kesadaran masyarakat masih rendah</p>
Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah	<p>Belum ditetapkan rencana detail tata ruang dan belum tersusunnya dokumen lain yang diamanatkan dalam RTRW;</p> <p>Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah;</p> <p>Belum optimalnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.</p>	Spm/indikator rpjmd	<p>Data belum lengkap dan kurangnya koordinasi serta kurangnya sosialisasi</p> <p>kurangnya koordinasi serta kurangnya sosialisasi</p> <p>kurangnya koordinasi serta kurangnya sosialisasi</p>	<p>Kebutuhan lahan yang tidak sesuai peruntukannya</p> <p>Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah</p> <p>Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah</p>	<p>Kebutuhan lahan yang tidak sesuai peruntukannya</p> <p>Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah</p> <p>Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah</p>

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persampahan	Belum optimalnya penanganan sampah, khususnya sampah dipermukiman dan industri; Belum optimalnya pengurangan timbulan sampah	Spm/indikator rpjmd	Kurangnya tenaga serta sarana dan prasarana (Seperti TPA yang terlalu jauh) Kurangnya sarana pengurangan sampah seperti : TPST 3R; tempat sampah terpilah	Kurangnya lahan untuk penempatan sarana tempat sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat Tidak mudahnya mencari lahan untuk TPST3R/TPS dan TPA	Kurangnya lahan untuk penempatan sarana tempat sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat Serta kurangnya peralatan penanganan sampah (armada sampah, alat berat) Belum adanya TPA sampah di Temanggung Bagian Utara Belum tercukupinya akan TPST 3R skala kelurahan atau Desa
Ruang Terbuka Hijau	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;		Belum ada masterplan pemanfaatan ruang terbuka hijau	Banyak terjadi alih fungsi lahan	Banyak terjadi alih fungsi lahan
Penambangan Batuan, energi terbarukan, Penerangan Jalan Umum	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang energi baru terbarukan sebagai bahan pengganti bahan bakar fosil; Masih adanya kegiatan penambangan yang menyebabkan kerugian materiil maupun kerusakan lingkungan; Kurangnya cakupan pelayanan Lampu Penerangan Jalan Umum.	Spm/indikator rpjmd	Sosialisasi yang masih belum intens, ketersediaan anggaran yang belum mencukupi, perhatian terhadap pengganti bahan bakar fosil belum maksimal Sosialisasi masih kurang intens, belum tersedianya solusi pengganti yang mencukupi Ketersediaan anggaran yang belum mencukupi, biaya pemeliharaan yang masih rendah	Perhatian masyarakat yang masih kurang, belum banyak ketersediaan bahan penggantian Kesadaran masyarakat penambang yang masih rendah, kurangnya lapangan pekerjaan Banyaknya lokasi yang masih perlu dilayani	Perhatian masyarakat yang masih kurang, belum banyak ketersediaan bahan penggantian Kesadaran masyarakat penambang yang masih rendah, kurangnya lapangan pekerjaan Banyaknya lokasi yang masih perlu dilayani

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemadam Kebakaran	Masih banyaknya kejadian bencana kebakaran yang belum bisa teetangani secara maksimal	SPM/indikator rpjmd	Personil sarana dan prasarana yang masih minim, tidak mencukupi untuk se wilayah Kabupaten Temanggung Sosialisasi akan bahaya kebakaran dan pencegahannya masih kurang intens	Belum sadarnya dunia usaha dan masyarakat akan bahaya kebakaran	Kurangnya personil, sarana dan prasarana pemadam kebakaran

Dari Tabel tersebut diatas tentang identifikasi permasalahan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang dominan dalam pelayanan ke PU an ada beberapa permasalahan. Diantaranya berupa minimnya anggaran pemeliharaan infrastruktur ke PU an.

Dari aspek kajian urusan perumahan rakyat, permasalahan yang muncul berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang layak. Dari aspek kajian urusan tata ruang permasalahan yang sering muncul yaitu kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

Dari aspek kajian urusan energi sumber daya mineral (ESDM), permasalahan yang timbul berupa kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai bahan pengganti dan masih dijumpainya adanya kegiatan penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan yang merusak lingkungan dan tidak pada lokasi penambangan.

Dari aspek kajian lingkungan hidup/persampahan, permasalahan yang timbul adalah masih rendahnya pelayanan dan pengelolaan sampah yang dikarenakan kekurangan fasilitas untuk pelayanan dan pengelolaan sampah seperti lahan TPA, TPS, TPST 3R. Serta masih rendahnya masyarakat dan dunia usaha akan pengelolaan sampah.

Dari aspek kajian pemerintahan dalam negeri (pemadam kebakaran), permasalahan yang timbul adalah masih rendahnya cakupan pelayanan kebakaran yang dikarenakan terbatasnya personil, peralatan serta pos pemadam.

3.2 TELAHAAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Temanggung Periode 2013 - 2018. Misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung adalah pada misi ke satu, ke tiga, ke lima dan ke enam yaitu sebagai berikut

1. Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan.
2. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan.
3. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat
4. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Kabupaten Temanggung 2013 - 2018, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati No. 73 Tahun 2012 tentang uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung

a. Visi Kabupaten Temanggung

Visi Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 merupakan perwujudan dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih, yaitu:

“Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Bermasyarakat Agamis, Berbudaya, Dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih”

b. Misi Kabupaten Temanggung

1. Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan;
2. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
6. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

c. Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dengan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Terpilih.

Misi Kepala Daerah ke 1 (satu) yaitu Mewujudkan Peningkatan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan, sangat terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum pada bidang Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Jasa Konstruksi, Seksi Irigasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang mana irigasi merupakan komponen vital dalam menuju pertanian modern.

Misi Kepala Daerah ke 3 (tiga) yaitu Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan, sangat terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum pada bidang Jalan dan Jembatan, bidang Cipta Karya dan Tat Ruang dan bidang Tata Kota, yang mana infrastruktur permukiman perdesaan dan perkotaan tersebut sangat berkaitan dengan tiga bidang di Dinas Pekerjaan Umum seperti antara lain:

1. Infrastruktur jalan permukiman di perdesaan dan perkotaan;
2. Infrastruktur persampahan;
3. Infrastruktur air bersih/air minum, air limbah dan drainase;
4. Infrastruktur trotoar, talud penahan tebing dan turap.

Misi Kepala Daerah ke 5 (lima) yaitu Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat, sangat terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum pada bidang Cipta Karya dan Tat Ruang dan bidang Tata Kota, yang mana infrastruktur sanitasi (persampahan, limbah, drainase dan air bersih/minum) merupakan komponen vital untuk menuju budaya sehat.

Misi Kepala Daerah ke 6 (enam) yaitu Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik, sangat terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum pada semua bidang, yang mana dalam menjalankan fungsi sebagai pelayanan publik (persampahan, Penerangan Jalan Umum, Pertamanan / Pohon Ayoman, Irigasi, Jasa Konstruksi, alat berat dan Pemadam Kebakaran) harus mendukung pelaksanaan misi ini.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Dalam hal daya saing global tersebut .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung dituntut untuk mampu melaksanakan Visi Pembangunan Kabupaten Temanggung 2013 - 2018, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung pada periode 2013-2018 adalah terwujudnya peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan untuk menuju budaya sehat dengan berorientasi pada pelayanan publik, tentunya juga dilandasi oleh 'Isu Strategis' sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang.

Tabel 18

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi ke 1 (satu) : Mewujudkan Peningkatan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan,	1.)Masih belum optimalnya operasi dan pemeliharaan saluran Irigasi yang ada; 2.)Belum optimalnya sistem informasi irigasi 3.)Masih rendahnya jaringan irigasi di Kabupaten Temanggung (pembangunan	Terbatasnya Anggaran dan Terbatasnya SDM di Dinas Pekerjaan Umum	Dengan Adanya Tambahan SDM di Dinas Pekerjaan Umum

<p>Misi ke 3 (tiga) : Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan</p> <p>Misi ke 5 (lima): Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat</p> <p>Misi ke 6 (enam) : Mewujudkan</p>	<p>jaringan irigasi baru masih rendah)</p> <p>4.)Masih adanya jalan, jembatan, drainase, dan trotoar dengan kondisi yang rusak dan rusak berat;</p> <p>5.)Belum optimalnya sistem informasi infrastruktur daerah;</p> <p>6.)Rendahnya ketersediaan jalan alternatif sebagai pengurai kepadatan lalu lintas;</p> <p>7.)Belum maksimalnya Lampu Penerangan Jalan Umum</p> <p>8.)Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pelayanan sarana dan prasarana air bersih, air limbah dan drainase;</p> <p>9.)Rendahnya pengelolaan, pengusaha, dan pemanfaatan air tanah;</p> <p>10.) Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan kebersihan dan persampahan</p> <p>11.)Belum optimalnya penanganan ruang terbuka hijau.</p> <p>12.)Belum maksimalnya fungsi sebagai pelayanan publik</p>		
---	---	--	--

Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	(persampahan, Penerangan Jalan Umum, Pertamanan / Pohon Ayoman, Irigasi, Jasa Konstruksi, alat berat dan Pemadam Kebakaran)		
---	---	--	--

Dari tabel 20 diatas faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, dapat dijelaskan yaitu :

- a. Terbatasnya sumber daya manusia dibandingkan dengan target pelayanan yang harus dipenuhi. Baik secara kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung masih dirasa kurang apalagi banyak yang memasuki usia pensiun.
- b. Keterbatasan anggaran dibandingkan dengan jumlah infrastruktur yang harus ditangani khususnya untuk pemeliharaan infrastruktur ke PU an.
- c. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung infrastruktur pekerjaan umum yang memadai.

3.3 TELAHAAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TELAHAAN RENSTA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH

A. TELAHAAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum guna mencapai sasaran – sasaran strategis Kementerian. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan

sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (*local capacity building*) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) termasuk peraturan daerah serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kampanye/sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK. Dengan melaksanakan Renstra secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud. Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang pekerjaan umum akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-sasaran strategis kementerian yang mempunyai cakupan secara nasional dan strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dengan misi Kementerian Pekerjaan Umum 2010 - 2014 terdapat pada semua misi. Guna mendukung keterkaitan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Temanggung mewujudkannya dengan meningkatkan kinerja kebinamargaan, kecipta karya, sumber daya air dan penataan ruang.

B. TELAHAAN RENSTRA BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur kebinamargaan dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Bina Marga guna mencapai sasaran – sasaran strategis Dinas. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata.

Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten , Pemerintah Daerah Provinsi akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (*local capacity building*) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah Provinsi untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) termasuk peraturan daerah serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kampanye/sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK. Dengan melaksanakan Renstra secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, swasta, dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud. Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang pekerjaan umum akan memberikan keyakinan

bahwa pencapaian sasaran-sasaran strategis dinas yang mempunyai cakupan secara regional dan strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dengan misi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terdapat pada semua misi. Guna mendukung keterkaitan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung mewujudkannya dengan meningkatkan kinerja kebinamargaannya.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung Tahun 2011 – 2031 telah ditetapkan dalam Perda No. 1 Tahun 2012. Berdasarkan materi teknis RTRW 2011-2031 dan hasil kajian oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), jenis bencana alam yang sering terjadi dan kawasan yang memiliki potensi bencana alam sebagaimana disajikan pada tabel 21:

Tabel 19

Jenis dan Kawasan Potensi Bencana Alam
Kabupaten Temanggung

No	Jenis Bencana Alam	Kecamatan
1	Potensi Tanah Longsor	Tretep, Wonoboyo, Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Jumo, Bansari, Kledung, Kaloran, Kranggan, Tembarak, Kedu, Pringsurat, Bulu, Tlogomulyo, Ngadirejo, dan Selopampang

2	Potensi Angin Ribut (Puting Beliung)	Selopampang, Bulu, Tembarak, Tlogomulyo, Temanggung, Kranggan, Bansari, Ngadirejo, Bejen, Kledung, Tretep, Jumo, Kaloran, Kedu, Gemawang, Wonoboyo dan Pringsurat
3	Potensi Banjir	Temanggung, Kedu, Bejen dan Parakan
4	Potensi Kekeringan	Kranggan, Pringsurat, Kranggan, Tlogomulyo, Candiroto, Gemawang, Jumo, Bulu, Kaloran, Bejen, dan Kandangan
5	Potensi Bencana Alam Lainnya (Gempa, Kebakaran Hutan, Gas Beracun, Gunung Api, Kebakaran Pemukiman, dll)	Pringsurat, Kranggan, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tretep, Bejen dan Bansari

Sumber : BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2013

Potensi kekeringan menjadi salah satu tugas Dinas Pekerjaan Umum khususnya seksi sarana dan prasarana air bersih untuk menanggulangnya. Potensi bahaya yang lain yang berkaitan dengan infrastruktur juga menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

Pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan program (KRP) perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kumulatif.

Pembangunan berkelanjutan perlu terintegrasikan dalam pengambilan keputusan melalui informasi yang lebih komprehensif tentang lingkungan hidup

Diperlukan wahana untuk mencari opsi-opsi pembangunan yang lebih berkelanjutan

Menghindarkan implikasi negatif pada aras kegiatan pembangunan yang lebih mikro melalui arahan yang lebih berkelanjutan sejak hulu pengambilan keputusan

Hal yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan KLHS terutama kaitannya dengan Dinas Pekerjaan Umum adalah permasalahan DAS, Sub DAS dan Sub Sub DAS.

Sumber air baku selain mata air adalah sumber air baku sungai. Sumber air baku yang berasal dari sungai sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan irigasi. Secara hidrologi sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dikelompokkan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS), Sub DAS, dan Sub-sub DAS sebagaimana tertera pada tabel 22 :

Tabel 20

Pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kabupaten Temanggung

Tahun 2012

No	Nama DAS	Nama Sub DAS	Nama Sub-sub DAS	Luas (Ha)
1	DAS Progo	Sub DAS Tangsi	Sub-sub DAS Plumbon	3.010,51
			Sub-sub DAS Lungge	5.058,68

No	Nama DAS	Nama Sub DAS	Nama Sub-sub DAS	Luas (Ha)
			Total Sub DAS Tangsi	8.069,19
		Sub DAS Elo	Sub-sub DAS Elo	2.421,19
			Sub-sub DAS Murung	7.267,37
			Sub-sub DAS Tingal	9.145,62
			Total Sub DAS Elo	18.834,18
		Sub DAS Progo Hulu	Sub-sub DAS Kuas	6.960,70
			Sub-sub DAS Galeh	11.298,35
			Sub-sub DAS Progo Hulu	8.948,73
			Sub-sub DAS Grabah	3.167,97
			Total Sub DAS Progo Hulu	30.375,75
	Total DAS Progo			57.279,12
2	DAS Bodri	Sub DAS Logung	Sub-sub DAS Logung	5.509,06
		Sub DAS Lutut	Sub-sub DAS Lutut	11.392,10
			Sub-sub DAS Pupu	6.640,63
			Total Sub DAS Lutut	23.541,79
		Sub DAS Putih	Sub-sub DAS Putih	6.041,43
	Total DAS Bodri			29.583,22
3	DAS Serayu			202,66
	TOTAL KABUPATEN			87.065

Sumber : RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 data diolah

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Penentuan isu – isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

3.5.1 Isu Strategis Bidang Jalan dan Jembatan

Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan diarahkan pada penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana perhubungan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan lebih diarahkan kepada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi atau kawasan industri. Pengembangan infrastruktur tersebut diprioritaskan juga pada kawasan pedesaan yang menghubungkan pedesaan dan perkotaan.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan harus didukung sinkronisasi dan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan rencana tata ruang wilayah untuk meningkatkan keterpaduan dengan jaringan prasarana lainnya. Pembangunan jalan diprioritaskan yang dapat memicu pengembangan wilayah dan membuka daerah terisolir.

Begitu juga pembangun Jalan dan jembatan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Mengingat masyarakat terbesar adalah yang berprofesi petani dan sebagian besar masyarakat tinggal di daerah pedesaan kebijakan pembangunan kedepan harus berbasis pada penyediaan infrastruktur pedesaan seperti peningkatan kualitas pada jalan-jalan jalur berekonomian antar desa dan antar desa-kota kecamatan.

3.5.2 Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral

Penyediaan dan pengembangan jaringan irigasi ditargetkan akan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, yang pada

gilirannya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dankerusakan jaringan irigasi lebih banyaknya disebabkan terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan jaringan irigasi. Kerusakan jaringan irigasi akan mempengaruhi produktifitas pertanian yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sumber Daya Mineral belum banyak yang diusahakan karena tidak semua mempunyai nilai ekonomis untuk ditambang.

Sumber Daya Mineral yang selama ini dilakukan penambangan terbatas adalah Penambangan batu alam, utamanya pasir dan batu.

Isu strategis urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang perlu ditangani adalah :

- a. Perlunya regulasi tentang pengelolaan Penambangan Bahan mineral bukan logam dan batuan
- b. Perubahan peruntukan lahan pertanian ke pertambangan Penambangan batu alam tanpa melakukan prosedur perijinan sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat maupun pengusaha tambang bahan Penambangan batu alam tentang peraturan perundangan dan upaya pemulihan bekas areal penambangan
- d. Belum terpadunya koordinasi antar instansi terkait dalam penerapan peraturan pengelolaan pertambangan bahan mineral bukan logam dan batuan.

3.5.3 Isu Strategis Bidang Perumahan Rakyat dan Tata Ruang

Pelaksanaan urusan perumahan rakyat meliputi penataan perumahan dan sarana dan prasarana lingkungan perumahan. Beberapa isu strategis dalam pelaksanaan urusan perumahan adalah :

- a. Masih banyaknya rumah tidak layak huni
- b. Terbatasnya lingkungan perumahan yang sehat

c. Belum tertatanya sanitasi lingkungan perumahan

Sedangkan pelaksanaan urusan penataan ruang untuk lima tahun kedepan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008, didasari dengan isu strategis, diantaranya :

1. Pemanfaatan Ruang kota belum sesuai ketentuan
 - a. Tidak terkendalinya pendirian bangunan, seperti tower
 - b. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) didaerah perkotaan
 - c. Tidak terkendalinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
2. Alih fungsi lahan pertanian teknis menjadi lahan terbangun.

3.5.4 Isu Strategis Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Pembangunan TPA, Ruang Terbuka Hijau / Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum.

Persampahan untuk menuju budaya hidup sehat merupakan persoalan yang sangat kompleks, apabila tidak ada sinergitas kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan sampah sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat. Ada beberapa isu strategis untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut :

- a. Promosi program 3R (Reuse, Recycle, Reduce) dan Bank Sampah ke masyarakat untuk menciptakan Tempat Penampungan Sampah Sementara Terpadu (TPST) 3R, sehingga sampah bisa tereduksi di sumbernya dan memperpanjang umur TPA.
- b. Peningkatan kualitas lingkungan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya dan membuang sampah pada tempat sesuai jenisnya,

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah merupakan infrastruktur yang mahal konstuksi dan sulit mendapatkan

lokasinya. Adapun isu strategis untuk hal ini adalah sebagai berikut:

1. Jauhnya jarak antara sumber sampah dengan TPA di Temanggung wilayah Utara (lebih dari 30 km), maka untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sampah diperlukan TPA di wilayah Temanggung Utara.
2. Untuk meminimalisir dampak TPA ke lingkungan maka di perlukan pengoperasionalan TPA sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu dengan metode *controll landfill*. Dan juga pengolahan air limbah sampah (*leachet*) semaksimal mungkin sedah sesuai baku mutu.

Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum merupakan dua komponen untuk menuju kesehatan, keindahan dan keamanan di lingkungan perkotaan dan jalan raya. Isu strategis dari hal ini adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Penerangan Jalan Umum di jalan jalan protokol.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas taman di Kabupaten Temanggung.

3.5.5 Isu Strategis Pemadam Kebakaran

Masih tingginya kejadian kebakaran di Kabupaten Temanggung dan masih rendahnya cakupan manajemen pelayanan Bahaya Kebakaran, maka perlu peningkatan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu penambahan pos Pemadam Kebakaran di beberapa titik wilayah di Kabupaten Temanggung.
2. Perlu penambahan peralatan pemadam kebakaran untuk memenuhi pos pos tersebut.
3. Perlu penambahan personil pemadam kebakaran untuk beberapa pos tersebut.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

A. VISI

Dinas Pekerjaan Umum adalah satu satuan kerja yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan dibidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral (ESDM). Sesuai fungsi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum harus mempunyai Visi dan Misi untuk mendukung dalam mencapai visi dan misi Daerah. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum yaitu:

“MENJADIKAN INFRASTRUKTUR YANG LAYAK DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN ”

Pernyataan visi tersebut mengandung pengertian bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung sebagai motor pelaksanaan pembangunan infrastruktur akan mempunyai tujuan untuk menjadikan infrastruktur di Kabupaten Temanggung yang layak untuk bisa dinikmati oleh masyarakatnya. Disamping itu juga akan memperhatikan pengelolaan pembangunan secara luas dan berkesinambungan dengan peduli akan lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan, layak secara kuantitas dan kualitas dan dapat menjamin kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan hidup antar generasi.

Semangat dari visi tersebut diharapkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi yang akan datang. Visi tersebut juga mengandung semangat pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang harus layak, dimana pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pembangunan akan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling

memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat.

Pertimbangan yang digunakan dalam perumusan visi tersebut yaitu dengan memperhatikan:

- a) Tujuan pembangunan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 yang terangkum juga dalam tujuan Pemerintah Kabupaten Temanggung, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;
- b) Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c) Tupoksi dan SDM pada lembaga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung;
- d) Kondisi dan potensi yang ada di Wilayah Kabupaten Temanggung, sebagai daerah agraris dengan luas wilayah 82.616 Ha yang merupakan tanah pertanian.

B. MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka dalam 5 (lima) tahun kedepan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung mempunyai 3 misi yaitu:

a) Misi Pertama :

Mengembangkan memberdayakan dan melestarikan infrastruktur transportasi darat, irigasi dan sumber daya air.

Makna dari misi ini yaitu sebagai penjabaran dari urusan pekerjaan umum. Bahwa Pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung diarahkan dan difokuskan pada pengembangan dari pembangunan yang telah dilaksanakan dan mendayagunakan potensial yang ada serta memelihara nilai konstruksi pada bangunan sarana dan prasarana jalan/jembatan, irigasi, sumber daya air,

Isu-isu strategis dari Misi Pertama:

- a.1) Masih dijumpai jalan dan jembatan yang rusak dan tidak layak;
- a.2) Belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di semua wilayah.

a.3) Kurang terpeliharanya dan belum memadainya bangunan/jaringan irigasi

a.4) Belum maksimalnya peran serta masyarakat dalam merawat, memelihara dan merehabilitasi infratraktur jalan/jembatan, irigasi dan sumber daya air.

b) Misi Kedua:

Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang memadai, serasi dan berkelanjutan

Makna dari misi ini yaitu pengelolaan dan penanganan di wilayah Kabupaten Temanggung dapat mencerminkan kondisi lingkungan yang serasi, bersih dan nyaman serta mempunyai keseimbangan pemerataan pembangunan disemua tingkatan. Fokus dari misi ini yaitu untuk urusan perumahan rakyat, penataan ruang, lingkungan hidup, dan energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Isu-isu strategis dari Misi Kedua:

b.1) Masih adanya hunian lingkungan perumahan rakyat yang tidak layak:

b.2) Banyak dijumpainya pembangunan yang tidak taat pada pola pemanfaatan ruang berdasar aturan yang ada;

b.3) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah;.

b.4) Belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan eksploitasi yang merusak lingkungan.

c) Misi Ketiga:

Mewujudkan manajemen yang professional di bidang pembangunan untuk urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, lingkungan hidup dan energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Makna dari misi ini yaitu seiring dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima, maka tugas-tugas pelaksanaan pembangunan yang menjadi tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung harus dilaksanakan secara profesional, terukur dan terarah.

Isu-isu strategis dari Misi Ketiga:

- c.1) Masih belum optimalnya pelayanan 5 urusan DPU Kabupaten Temanggung kepada masyarakat
- c.2) Semakin berkurangnya jumlah personil yang ada dibandingkan dengan tuntutan akan pemenuhan infrastruktur yang layak.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan selama lima tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung adalah merupakan acuan dari pencapaian rencana yang akan dicapai pada tahun ini dan 5 tahun mendatang secara lebih spesifik dan terukur sebagai wujud dari pembangunan yang berkesinambungan. Adapun tujuan adalah sebagai berikut :

1. Penataan Ruang wilayah Kabupaten Temanggung;
2. Perluasan jaringan jalan dan jembatan serta pengembangan jaringan irigasi;
3. Penataan dan pengendalian kawasan pertambangan;
4. Meningkatkan nilai konstruksi pada jalan, jembatan dan prasarana jaringan irigasi;
5. Memperpanjang usia konstruksi untuk jalan, jembatan dan sarana irigasi dengan melakukan pemeliharaan secara rutin;
6. Pemanfaatan secara maksimal infrastruktur yang sudah dibangun;
7. Meningkatkan prasarana untuk mencapai pemukiman layak huni;
8. Mengoptimalkan kelengkapan sarana pendukung, guna memperlancar pelaksanaan pekerjaan infrastruktur konstruksi jalan, jembatan dan pengairan;

9. Mengembangkan teknologi ke-PU-an yang tepat guna serta dapat meningkatkan keandalan mutu infrastruktur;
10. Meningkatnya pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;

Sasaran :

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai beberapa sasaran dari masing – masing misi dan tujuan yang telah dirumuskan. Sasaran ini merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam mendukung capaian sasaran yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung. :

1. Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian ruang;
2. Semakin bertambah panjangnya jalan, jembatan, jaringan irigasi baru;
3. Terwujudnya tertib pengelolaan kawasan pertambangan;
4. Meningkatkan nilai konstruksi pada jalan, jembatan dan prasarana jaringan irigasi menjadi lebih baik;
5. Pemeliharaan secara terencana dan rutin infrastruktur jalan, jembatan dan jaringan irigasi;
6. Penyediaan prasarana pelengkap pada infrastruktur jalan, jembatan dan sarana jaringan irigasi serta pemberdayaan pengelolaan jaringan irigasi;
7. Pemanfaatan sarana pendukung secara efisien dan efektif lewat pemeliharaan secara terencana dan rutin;
8. Tertingkatnya mutu infrastruktur sesuai dengan perkembangan teknologi;
9. Terwujudnya lingkungan perumahan yang serasi dan teratur;
10. Peningkatan kualitas pengelola infrastruktur;

Tabel 21

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan acuan dari pencapaian rencana yang akan dicapai pada tahun ini dan 5 tahun mendatang secara lebih spesifik dan terukur sebagai wujud dari pembangunan yang berkesinambungan	1. Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian ruang;	Persentase Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan Selamat	69.7%	70%	73%	76%	79%
			Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman	69.7%	70%	73%	76%	79%
		2. Semakin bertambah panjangnya jalan, jembatan, jaringan irigasi baru;	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	81,83 %	82%	84%	86%	88%
			Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan	81,83 %	82%	84%	86%	88%
		3. Terwujudnya tertib pengelolaan kawasan pertambangan;	Tersedianya lahan untuk persiapan pembangunan jalan lingkar Kota Parakan	-	-	2	6	11
			Persentase Jalan yang Kondisi Baik	68	70	73	76	79
		4. Meningkatkan nilai konstruksi pada jalan, jembatan dan prasarana jaringan irigasi menjadi lebih baik;	Persentase Jembatan yang Kondisi Baik	71	76	81	84	87
			Persentase Jembatan yang Kondisi Baik	71	76	81	84	87
		5. Pemeliharaan secara terencana dan rutin infrastruktur jalan, jembatan dan jaringan irigasi;	Persentase Tersedianya Alat Berat dengan Kondisi Baik	67	67	70	76	80
			Tersedianya air irigasi pada sistim irigasi yang sudah ada	68	70	72	75	78
		6. Penyediaan prasarana pelengkap pada infrastruktur jalan,	Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif	4.60	4.9	5.2	5.5	5.8
			Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	30.71	30.9	40.1	40.3	40.5

	jembatan dan sarana jaringan irigasi serta pemberdayaan pengelolaan jaringan irigasi;	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	7,95	8,5	10	12	14
	7.Pemanfaatan sarana pendukung secara efisien dan efektif lewat pemeliharaan secara terencana dan rutin;	Persentase Kondisi bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai	80	85	85	90	95
		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	94.6	94.92	95.24	95.56	95.88
		berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	35.56	32.36	28.81	25.42	22.3
	8.Tertingkatnya mutu infrastruktur sesuai dengan perkembangan teknologi;	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	20	20	40	60	80
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	68	70	73	80	80
	9.Terwujudnya lingkungan perumahan yang serasi dan teratur;	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	83	85	87	90	93
		Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - 5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	82	85	87	90	93
	10.Peningkatan kualitas pengelola infrastruktur;	Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian	16.1	16.4	16.7	17	17.3
		Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan	76,05	78	80	82	84

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. STRATEGI

Untuk mencapai sasaran yang sudah ditargetkan pada Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Temanggung dalam urusan pekerjaan umum, maka perlu dibuat strategi yang dirancang secara konseptual, analistis, realistik, rasional dan komprehensif.

Strategi selama 5 (lima) tahun ke depan di Dinas Pekerjaan Umum mempunyai prinsip yang berkesinambungan, yang mempunyai arti bahwa

program pembangunan yang akan dilaksanakan adalah pembangunan yang berkelanjutan dan terus menerus.

Prinsip Pembangunan yang berkelanjutan dan terus menerus tersebut akan berpijak pada program-program prioritas yang mengedepankan penataan ruang yang nyaman dan berkualitas serta pembangunan dan pengembangan infrastruktur.

Strategi tersebut diatas tentunya tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan ekonomi Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum akan merangkul Stakeholder yang ada untuk membantu dalam mencapai sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

Strategi Dinas Pekerjaan Umum tersebut juga akan diikuti dengan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat diantaranya pembinaan industri jasa konstruksi ataupun pembinaan petani pemakai air.

B. KEBIJAKAN

Berdasarkan strategi Dinas Pekerjaan umum tersebut diatas, dirumuskan kebijakan umum yang akan dilaksanakan oleh Dinas terkait. Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum sehubungan dengan strategi tersebut diatas adalah :

1. Meningkatkan jumlah jalan dan prasarananya dengan kondisi baik;
2. Meningkatkan jumlah jalan yang beraspal;
3. Meningkatkan jumlah jembatan yang memadai;
4. Pemenuhan ketersediaan alat – alat ke PU-an;
5. Meningkatkan jumlah jalan perdesaan yang beraspal;
6. Mengoptimalkan fungsi drainase;
7. Meningkatkan jumlah trotoar yang memadai;
8. Mewujudkan prasarana aparatur yang memadai;
9. Meningkatkan jumlah dan kualitas jaringan irigasi;
10. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan;
11. Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat;

12. Optimalisasi kebijakan sarana dan prasarana dasar pemukiman;
13. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perumahan;
14. Meningkatkan ketaatan pemanfaatan ruang sesuai RT/RW;
15. Berfungsinya ruang kota/pedesaan secara baik;
16. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pelayanan perijinan reklame.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2014 – 2018 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 - c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
 - d. Pengadaan peralatan komputer dan printer untuk UPTD.
2. Program Pembangunan jalan dan jembatan
 - a. Pembangunan Jalan;
 - b. Pembangunan Jembatan;
 - c. Pembangunan Jalan Perdesaan;
 - d. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan (DAK);
 - e. Peningkatan Jembatan;
 - f. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (pendampingan DAK);
 - g. Peningkatan Jalan Kabupaten.
3. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong:
 - a. Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong;
 - b. Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong.
4. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
 - a. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
 - b. Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan
5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
 - a. Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan;
 - b. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan.
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
 - a. Rehabilitasi / pemeliharaan laboratorium kebinamargaan;
 - b. Rehabilitasi / pemeliharaan alat – alat berat;

- c. Kegiatan pengadaan alat berat.
 - 1) Backhoe Loader;
 - 2) Dump Truck.
- 7. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya:
 - a. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum;
 - b. Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi (DAK non DR);
 - c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK non DR);
 - d. Rehabilitasi /Pemeliharaan pintu air;
 - e. Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun;
 - f. Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pembinaan Petani Pemakai Air (P3A);
 - g. Pendampingan Water Resources and irrigation sector management program (WISMP);
 - h. Pendampingan Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi (DAK non DR);
 - i. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum (pendampingan DAK non DR);
 - j. Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Managemen Program (WISMP);
 - k. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi;
 - l. Pembangunan Infrastruktur Air Minum;
 - m. Fasilitas Forum Daerah Aliran Sungai Kabupaten Temanggung.
- 8. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
 - a. Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
 - b. Fasilitas Hibah Infrastruktur Perdesaan
- 9. Program Pengembangan Prasarana Perkotaan
 - a. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
 - b. Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum
 - c. Pembangunan Panggung Reklame
 - d. Pendataan LPJU
- 10. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar
 - a. Pembangunan Trotoar;

- b. Rehabilitasi / pemeliharaan trotoar;
- 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
 - a. Pendampingan PNPM Perkotaan
 - b. Peningkatan Kualitas Lingkungan
- 12. Program Perumahan
 - a. Fasilitasi Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni
- 13. Program Lingkungan Sehat Perumahan
 - a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
 - b. Pendampingan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM);
 - c. Fasilitasi SPPID Penataan Kawasan Permukiman.
- 14. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran;
 - b. Operasional Pemadam Kebakaran;
 - c. Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran;
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
- 15. Program pengendalian pemanfaatan ruang;
 - a. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 16. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - a. Peningkatan OP Prasarana dan Sarana Persampahan;
 - b. Pemeliharaan Kebersihan;
 - c. Revitalisasi Prasarana Persampahan;
 - d. Peningkatan TPA Sanggrahan;
 - e. Pengadaan Truck arm roll dan kontainer;
 - f. Pengadaan Lahan untuk TPA;
 - g. Operasi dan Pemeliharaan alat angkut sampah dan listrik;
 - h. Fasilitasi Bantuan RT/RW Kabupaten Temanggung;
 - i. Fasilitasi bantuan hibah peningkatan kualitas lingkungan;
 - j. Pengadaan Mobil Tinja;
 - k. Pengadaan Alat Angkut Sampah;
 - l. Pengadaan Dump Truck;

- m. Peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST 3R;
- n. Pengadaan Alat Berat untuk TPA;

17. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- a. Penataan dan pemeliharaan RTH;
- b. Pembangunan RTH;
- c. Pengadaan Mobil Operasional Pemeliharaan Taman.

18. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

- a. Monitoring dan Pengendalian Penambangan Bahan galian C (Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan);
- b. Penyusunan Raperda Penanganan Penambangan bahan Mineral Bukan Logam;

Adapun kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana terlampir di tabel 22

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung pada tahun 2014 – 2018 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 23

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan Selamat	69.7%	70%	73%	76%	79%	82%	82%
2	Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman	69.7%	70%	73%	76%	79%	82%	82%
3	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	81,83%	82%	84%	86%	88%	90%	90%

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan	81,83%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
5	Tersedianya lahan untuk persiapan pembangunan jalan lingkaran Kota Parakan	-	-	2	6	11	19	19
6	Persentase Jalan yang Kondisi Baik	68	70	73	76	79	82	82
7	Persentase Jembatan yang Kondisi Baik	71	76	81	84	87	90	90
8	Persentase Jembatan yang Kondisi Baik	71	76	81	84	87	90	90
9	Persentase Tersedianya Alat Berat dengan Kondisi Baik	67	67	70	76	80	80	85
10	Tersedianya air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada	68	70	72	75	78	80	82
11	Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif	4.60	4.9	5.2	5.5	5.8	6.1	6.1

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	30.71	30.9	40.1	40.3	40.5	40.7	40.7
13	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	7,95	8,5	10	12	14	16	18
14	Persentase Kondisi bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai	80	85	85	90	95	100	100
15	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	94.6	94.92	95.24	95.56	95.88	96.2	96.2
16	berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	35.56	32.36	28.81	25.42	22.3	19.91	19.91
17	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	20	20	40	60	80	80	80

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	68	70	73	80	80	80	80
19	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	83	85	87	90	93	95	95
20	Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - 5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	82	85	87	90	93	95	95
21	Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian	16.1	16.4	16.7	17	17.3	17.6	17.6
22	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan	76,05	78	80	82	84	85	86

Tabel tersebut diatas tentang indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung dapat disampaikan bahwa ada 22 indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Temanggung, dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD yang positif. Harapannya dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada dan peningkatan kemampuan aparturnya 22 indikator kinerja tersebut dapat terlampaui dari target RPJMD yang ditetapkan.

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja yang disusun setiap tahunnya. Renstra ini merupakan pejabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Temanggung dan sebagai panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, lingkungan hidup, dan energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Dalam dokumen ini menggambarkan peran sentral pembangunan infrasktur dengan mengedepankan perencanaan strategis yang memperhatikan semua variabel yang terkait dan peran *stakeholders* dalam pembangunan Kabupaten Temanggung. Sebagai bahan perencanaan strategis 5 tahunan, tentunya perlu review setiap tahunnya agar *guideline* tidak melenceng jauh dari strategis perencanaan di tingkat yang lebih tinggi.

Diharapkan semua kegiatan dapat terpadu, terarah dan terukur untuk mencapai visi misi Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 10 Maret 2014
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Ir. SUPARDIYONO, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19600822 199302 1 001